

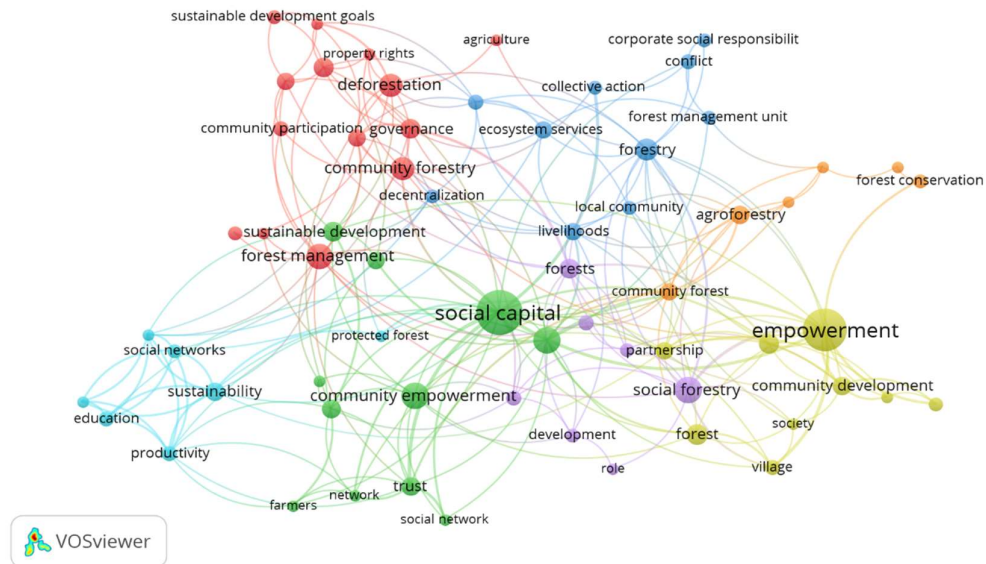
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang memiliki kedekatan dengan judul penelitian yang peneliti lakukan yaitu mengenai “Pemberdayaan Masyarakat Di sekitar Hutan berbasis Modal Sosial Dalam Pengelolaan Program Tanaman Kehidupan Di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau” maka, peneliti akan mengutip dan melihat kembali beberapa penelitian terdahulu yang berguna bagi peneliti untuk dijadikan referensi penelitian. Penelitian terdahulu berupa jurnal ilmiah yang telah dipublikasikan khususnya mengenai kebijakan hutan dari berbagai negara, berbagai daerah, dan berbagai judul berbagai penelitian.

Sebelum membahas mengenai penelitian terdahulu, peneliti terlebih dahulu menggunakan aplikasi *publish or parish 8* untuk melakukan pencarian tulisan dari *google scholar* yang berkaitan dengan tema yang peneliti angkat yaitu mengenai pemberdayaan Masyarakat, modal sosial dan pengelolaan Program Tanaman Kehidupan. Penelitian yang digunakan dimulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Dari hasil pencarian tersebut ditemukan artikel terindeks scopus, jurnal internasional dan jurnal nasional terakreditasi. Dari hasil pencarian tersebut dapat divisualisasikan melalui aplikasi *Vosviewer*, sehingga ditemukan penelitian yang paling dominan. Hal ini sangat membantu peneliti dalam menemukan *research gap* terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan dan modal sosial masyarakat di sekitar hutan dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.1
Visualisasi *Research Gap* Tentang Pemberdayaan Masyarakat Perspektif
Modal Sosial
Sumber: Olahan Peneliti, Aplikasi *Publish or Parish 8* dan *Vosviewer*, 2024

Berdasarkan analisis aplikasi *publish or parish 8* dan *Vosviewer* peneliti belum menemukan penelitian yang berkaitan dengan Pemberdayaan dan Modal Sosial masyarakat di sekitar hutan dalam pengelolaan program Program Tanaman Kehidupan. Penelitian yang hampir memiliki kesamaan adalah yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar hutan, namun berkaitan dengan Perhutanan Sosial. Perlu digaris bawahi bahwa perhutanan sosial dan Program Tanaman Kehidupan adalah dua hal yang berbeda, perhutanan sosial merupakan program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat yang ada disekitar hutan dalam rangka untuk konservasi dan menambah pendapatan masyarakat. Sedangkan Program Tanaman Kehidupan adalah kegiatan

pemberdayaan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat yang ada di sekitar hutan. Kemudian penelitian yang berkaitan dengan Program Tanaman Kehidupan pada hakekatnya adalah penelitian yang berkaitan dengan Hutan Tanaman Industri. Penelitian tentang Program Tanaman Kehidupan yang peneliti temukan lebih cenderung membahas mengenai pengelolaan areal Program Tanaman Kehidupan, analisis pelaksanaan, serta hubungan kinerja dan pendapatan petani yang mengikuti program, dampak sosial, ekonomi dan lingkungan. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berkaitan dengan Pemberdayaan masyarakat berbasis Modal Sosial Masyarakat di Sekitar Hutan Dalam Pengelolaan Program Tanaman Kehidupan dengan memakai teori pemberdayaan Robert Chambers dan Aswas, teori Modal Sosial menurut Putnam, Wooclock, Bodin and Crona. Serta faktor pendorong dan penghambat lainnya menurut Jim Ife dan Dave Adamson. Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti menilai penelitian yang peneliti lakukan memiliki keterbaruan dan pembeda dari penelitian sebelumnya, hal ini berdasarkan hasil penelitian yang peneliti review dan belum ditemui penelitian bertemakan pemberdayaan masyarakat khususnya mengenai Program Tanaman Kehidupan.

Salah satu komponen kunci dari pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan adalah pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Cara ini bertujuan untuk melindungi hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia telah meluncurkan sejumlah program yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal, dengan fokus khusus pada perhutanan sosial dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM). Menciptakan organisasi bisnis

perhutanan sosial merupakan strategi yang berhasil untuk memberdayakan masyarakat (KUPS). Studi menunjukkan bahwa inisiatif perhutanan sosial telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan yang berorientasi pada perkebunan dan pertanian (Phimmavong & Keenan, 2020); (Amaliyah et al., 2023). Kebijakan kehutanan berbasis masyarakat (CBF) telah diadopsi secara luas sebagai strategi pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang berpotensi efektif di Panama. Karena masyarakat dapat memiliki pengetahuan lokal dan kepentingan dalam keberlanjutan jangka panjang dari basis sumber daya, Kelangsungan Ekonomi, inisiatif, ilmu pengetahuan, kebijakan (Clare et al., 2019).

Selain itu, studi yang dilakukan di Malang menunjukkan bahwa adaptasi masyarakat terhadap praktik-praktik pengelolaan hutan sejalan dengan strategi perhutanan sosial, yang melibatkan penanaman, pemeliharaan, dan penjualan hasil hutan (Erbaugh, 2019). Hal ini menunjukkan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan dapat meningkatkan pengetahuan tentang nilai perlindungan hutan dan juga menghasilkan manfaat ekonomi yang besar. Hutan rakyat dalam kesejahteraan rumah tangga pedesaan sebagai sumber pendapatan karena Masyarakat desa yang ada di sekitar hutan tergantung dari hutan. Akses terhadap hutan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan, menunjukkan bahwa kebijakan yang membantu masyarakat miskin yang bergantung pada ekstraksi hutan dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan (Cheng et al., 2019).

Selain itu, ditekankan bahwa kerja sama yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan hutan sangat penting (Abedi Sarvestani & Ingram, 2020). Penelitian di Kamboja menunjukkan bahwa ekowisata berbasis

masyarakat dapat menjadi pendekatan yang efektif untuk pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat (Toko, 2019). Masyarakat yang terlibat dalam ekowisata tidak hanya memperoleh keuntungan finansial tetapi juga merasa lebih terlibat dalam pelestarian lingkungan (Pattiwael, 2019). Pendekatan ini tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem hutan (Muslih et al., 2023). Melalui partisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya hutan, masyarakat mendapatkan keuntungan ekonomi dan kontribusi pelestarian lingkungan (Y. Zhang et al., 2020).

Namun bagaimanapun tantangan tetap ada, seperti kurangnya partisipasi masyarakat dan kelemahan kelompok tani saat ini di mana kelompok masyarakat lebih memilih kegiatan seperti pelatihan kelembagaan dan akses pasar dibandingkan kegiatan teknis kehutanan (seperti pelatihan pembibitan, pemupukan, pemeliharaan, dan lain-lain) (Rosyidatuzzahro et al., 2019). Upaya pemberdayaan yang berhasil harus mencakup peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan melalui pelatihan (Benjamin et al., 2019). Selain itu, untuk mencapai tujuan keberlanjutan, penguatan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengelolaan hutan berbasis masyarakat sangat penting (Harbi et al., 2020).

Secara keseluruhan, pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan di Indonesia memerlukan pendekatan holistik dan kolaboratif yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan lembaga non-pemerintah. Oleh sebab itu, diharapkan dengan pemberdayaan ini dapat tercapai keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian hutan.

Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan adalah strategi penting untuk mencegah konflik yang sering terjadi antara pengelola hutan dan masyarakat. Konflik ini sering terjadi karena masyarakat tidak puas dengan cara pengelolaan sumber daya hutan dilakukan, yang tidak melibatkan mereka (Poudel, 2019); (Zamora & Estrada, 2020). Upaya pemberdayaan yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab atas sumber daya alam, sehingga mengurangi kemungkinan konflik antara berbagai pihak (Killian & Hyle, 2020).

Pengembangan keterampilan dan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan adalah salah satu pendekatan yang efektif untuk pemberdayaan Masyarakat (Savari et al., 2020). Selain itu, membangun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara langsung dengan hutan dapat meningkatkan jaringan sosial dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian hutan (Green et al., 2019). Penelitian juga menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat karena masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan hutan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang manfaat hutan dan dapat melindungi sumber daya tersebut dengan lebih baik (Mbeche et al., 2021). Dengan partisipasi masyarakat untuk mengelola hutan tanaman industri secara mandiri akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan hutan (Simo, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dapat membantu mengurangi konflik yang dapat muncul dari pengelolaan hutan yang tidak inklusif (Y. Zhang et al., 2020).

Secara keseluruhan, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui pendekatan partisipatif dan program-program yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan dapat menjadi solusi efektif untuk mencegah konflik dan memastikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Modal sosial memainkan peran penting dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan, khususnya di Indonesia, di mana pendekatan partisipatif semakin diakui sebagai hal yang penting dalam pengelolaan hutan lestari. Konsep modal sosial mencakup kepercayaan, norma, dan jaringan (Ido, 2019), yang memfasilitasi kerja sama di antara anggota masyarakat, yang sangat penting untuk tata kelola hutan yang efektif dan pengelolaan sumber daya (Kailola et al., 2023). Salah satu manfaat modal sosial adalah masyarakat dapat mengelola dan menjaga hutan New Zealand's (King et al., 2019). Masyarakat memperoleh keuntungan sosial, ekonomi, dan lingkungan (Ievdokymov et al., 2020). Penelitian lain menunjukkan bahwa masyarakat dengan modal sosial yang kuat lebih mungkin untuk terlibat dalam praktik-praktik pengelolaan hutan secara kolaboratif, yang mengarah pada hasil yang lebih baik dalam hal konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan (Lee et al., 2017); (Sylviani et al., 2020).

Dalam konteks hutan kemasyarakatan di Indonesia, modal sosial telah diidentifikasi sebagai faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan inisiatif pengelolaan hutan. Sebagai contoh, berbagai penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat, yang didorong oleh jaringan sosial dan kepercayaan di antara para anggotanya, dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas upaya pengelolaan hutan (Oktalina et al., 2022). Contoh nyata dari modal sosial ini adalah

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran penting modal sosial dalam pertanian petani kecil telah diakui secara luas. Pertumbuhan modal sosial terlihat dari bagaimana jaringan dan kepercayaan memfasilitasi akses ke sumber daya produktif dan berbagi pengetahuan di antara para petani di Afrika sub-Sahara (Kansanga et al., 2020). Modal sosial memfasilitasi aksi kolektif dalam masyarakat dan berdampak positif pada perlindungan penggunaan lahan (A. T. Nugraha et al., 2021), yang membantu masyarakat menjaga hutan dan kepercayaan kelompok membentuk jaringan sosial (Puspita et al., 2020).

Struktur tata kelola yang menggabungkan modal sosial sering kali lebih tangguh dan mudah beradaptasi dengan perubahan kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Sebagai contoh, model pengelolaan hutan kolaboratif yang memanfaatkan pengetahuan lokal dan ikatan sosial telah terbukti secara efektif mengatasi tantangan seperti deforestasi dan penipisan sumber daya (Borg et al., 2020). Integrasi modal sosial ke dalam strategi pengelolaan hutan tidak hanya memfasilitasi komunikasi yang lebih baik di antara para pemangku kepentingan, tetapi juga meningkatkan legitimasi keputusan pengelolaan, sehingga mengurangi konflik dan mendorong perilaku kooperatif (Paletto et al., 2019); (Valente et al., 2019). Selain itu, Jaringan terjadi antara individu dan institusi harus berjalan dengan baik. Komponen norma terdiri dari norma tertulis dan tidak tertulis, Norma sosial adalah kode etik bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Norma-norma ini membentuk mekanisme timbal balik atau mengikat antara anggotanya (R. Zhang et al., 2020). Kepercayaan yang muncul di Kelompok Tani Hutan didasarkan pada hubungan antara anggota kelompok tani dengan institusi

yang bekerja sama dengan tujuan mengembangkan kapulaga dengan cara yang menguntungkan (Hapsari & Rokhani, 2021).

Peran modal sosial tidak hanya terbatas pada masyarakat lokal, tetapi juga mencakup keterlibatan pemangku kepentingan yang lebih luas, termasuk organisasi pemerintah dan non-pemerintah. Komunikasi dan kolaborasi yang efektif di antara berbagai kelompok ini sangat penting untuk mengembangkan kebijakan pengelolaan hutan yang komprehensif yang mencerminkan kepentingan dan nilai-nilai semua pemangku kepentingan yang terlibat (Li & Stainback, 2020). Pengakuan modal sosial sebagai komponen penting dalam pengelolaan hutan menggaris bawahi perlunya kebijakan yang mendorong tata kelola partisipatif dan pelibatan masyarakat, untuk memastikan bahwa suara-suara lokal didengar dan dipertimbangkan dalam pengelolaan sumber daya hutan (Sarvašová et al., 2015). Modal ini berperan sebagai sumber daya berbasis hubungan, yang secara efektif mengurangi ketidakpastian lingkungan dan memperkuat hubungan antar aktor. Modal sosial berperan penting dalam memfasilitasi kolaborasi untuk konservasi hutan (Auer et al., 2020).

Kesimpulannya, modal sosial merupakan bagian integral dari keberhasilan pengelolaan hutan kemasyarakatan di Indonesia dan negara lainnya. Menumbuhkan kepercayaan, kerja sama, dan partisipasi aktif di antara para pemangku kepentingan, modal sosial meningkatkan efektivitas tata kelola hutan dan berkontribusi pada praktik-praktik pengelolaan berkelanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Program Tanaman Kehidupan (*Livelihood Plantation Program*) dalam pengelolaan hutan tanaman industri merupakan inisiatif penting yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal sekaligus memastikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Program ini sangat relevan dalam konteks Indonesia, di mana integrasi kebutuhan masyarakat dengan praktik-praktik hutan tanaman industri dapat meningkatkan mata pencaharian dan mengurangi konflik penggunaan lahan (Rosyidatuzzahro et al., 2019). Salah satu tujuan utama LPP adalah untuk memberdayakan masyarakat setempat dengan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan. Pendekatan partisipatif ini tidak hanya menumbuhkan rasa kepemilikan di antara anggota masyarakat tetapi juga meningkatkan kapasitas mereka untuk mengelola sumber daya hutan secara lestari (Gusliana, 2022). (Harbi et al., 2020).

Inisiatif pemberdayaan sering kali mencakup program pelatihan yang membekali penduduk lokal dengan keterampilan yang diperlukan untuk terlibat dalam praktik pertanian berkelanjutan, wanatani, dan ekowisata, sehingga dapat mendiversifikasi sumber pendapatan mereka (Wiyono et al., 2020). Sebagai contoh, pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di daerah-daerah seperti Kulon Progo telah menunjukkan bagaimana keterlibatan masyarakat lokal dapat menghasilkan manfaat ekonomi dan konservasi sumber daya hutan.

LPP menekankan pentingnya pengelolaan kolaboratif antara badan-badan pemerintah dan masyarakat lokal. Kolaborasi ini sangat penting untuk mengakui dan menghormati hak-hak penduduk lokal untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya hutan (Tamrin & Kamaluddin, 2021); (Slamet et al., 2024).

Membangun struktur tata kelola dan tanggung jawab yang jelas, program ini bertujuan untuk memitigasi konflik yang mungkin timbul akibat tumpang tindih klaim lahan dan penggunaan sumber daya (Amaliyah et al., 2023). Keberhasilan upaya kolaboratif semacam itu sering kali bergantung pada pembentukan kepercayaan dan saluran komunikasi di antara para pemangku kepentingan, yang dapat difasilitasi melalui pertemuan rutin dan sesi perencanaan partisipatif (Ramadhani et al., 2024).

Selain pemberdayaan ekonomi, LPP juga berfokus pada kelestarian lingkungan. Praktik-praktik berkelanjutan di hutan tanaman industri, seperti penggunaan bibit unggul secara genetis dan teknik pengelolaan lahan yang bertanggung jawab, dipromosikan untuk memastikan bahwa ekosistem hutan tetap sehat dan produktif (Foncha & Ewule, 2020). Fokus ganda pada peningkatan mata pencaharian dan pengelolaan lingkungan ini sangat penting untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang dalam pengelolaan hutan (Chomba et al., 2020). Selain itu, program ini juga mengakui peran perhutanan sosial sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip perhutanan sosial ke dalam LPP, masyarakat setempat dapat memperoleh manfaat dari sumber daya hutan sekaligus berkontribusi terhadap konservasi keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem (Eprilianto et al., 2023). Pendekatan holistik ini tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat secara langsung, tetapi juga menumbuhkan ketahanan terhadap tantangan lingkungan, seperti perubahan iklim dan deforestasi (Wright et al., 2021); (Yatim et al., 2023).

Sebagai kesimpulan, Program Tanaman Kehidupan dalam pengelolaan hutan tanaman industri merupakan strategi komprehensif yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat, mempromosikan praktik-praktik berkelanjutan, dan meningkatkan mata pencaharian. Dengan membina kolaborasi di antara para pemangku kepentingan dan mengintegrasikan prinsip-prinsip perhutanan sosial, program ini bertujuan untuk menciptakan pendekatan yang seimbang dalam pengelolaan hutan yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Mengacu kepada ringkasan penelitian terdahulu dapat peneliti simpulkan bahwa artikel atau jurnal yang peneliti review dimulai dari pemberdayaan Masyarakat di sekitar hutan, konflik kehutanan, modal sosial Masyarakat di sekitar hutan hingga program tanaman kehidupan (*livelihood plantation program*). Pemberdayaan masyarakat dewasa ini dianggap penting bagi semua pihak terutama bagi masyarakat, oleh sebab itu pemerintah mesti melakukan pemberdayaan masyarakat dengan melakukan pembangunan di segala bidang agar masyarakat terdorong untuk melakukan hal yang dari tidak mampu menjadi mampu, dari tidak berdaya menjadi berdaya. Berdasarkan statmant tersebut, maka dalam penelitian ini akan membahas teori untuk menunjang penelitian adalah:

1. Administrasi publik
2. Manajemen Publik
3. Pemberdayaan Masyarakat
4. Modal Sosial

2.2 Administrasi Publik

Administrasi, sebagai cabang ilmu sosial, tidak hanya pekerjaan korespondensi atau catat-mencatat. Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama yang dilakukan oleh berbagai orang dalam suatu organisasi untuk mencapai satu atau lebih tujuan yang telah diputuskan sebelumnya. Tujuan-tujuan ini dicapai secara efektif dan efisien oleh organisasi, sehingga tujuan tersebut dapat dicapai dengan lancar. Dengan demikian, bahwa yang dimaksud dengan administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang diambil dan dilaksanakan oleh dua orang atau lebih dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi apa pun bentuknya, baik itu organisasi publik, organisasi bisnis maupun non profit (Astuti et al., 2020).

Tidak ada definisi baku tentang administrasi publik, dikarenakan definisi yang ditawarkan oleh para ahli kesannya berbeda-beda namun memiliki makna yang sama. Tidak mudah mendefinisikan Administrasi Publik, ada tiga alasan pokok. *Pertama* karena begitu banyak definisi administrasi publik. The Liang Gie salah seorang pakar administrasi publik yang pertama di Indonesia berhasil menginventarisir definisi administrasi publik. *Kedua*, jika administrasi publik hanya semata-mata dianggap sebagai ilmu usaha negara dan urusan negara saat ini lebih kompleks daripada urusan negara di masa yang akan datang. *Ketiga*, dengan munculnya konsep pemerintahan yang baik (*good governance*), administrasi negara semakin kompleks dikarenakan sebagai akibat keleluasaan dan kerumitan yang dihadapi (Soselisa & Puturuhi, 2021).

Soempono mendefinisikan administrasi publik adalah bagian dari lembaga dan badan pemerintahan negara sebagai bagian dari pemerintah eksekutif, baik di pusat maupun di daerah, yang tugas kegiatannya terutama melaksanakan kebijakan pemerintah (*public policy*). Leonard D. White mengatakan bahwa Semua tindakan atau upaya untuk mencapai tujuan berdasarkan kebijakan negara disebut administrasi publik (Thoha, 2018). Robbins menyatakan bahwa Administrasi adalah keseluruhan proses mencapai tujuan dengan dan melalui orang lain (Astuti et al., 2020).

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nicholas Henry (Astuti et al., 2020), perkembangan ilmu administrasi publik dapat dibagi ke dalam lima paradigma yaitu:

1. Paradigma 1 : Dikotomi politik-administrasi (1900-1926).
2. Paradigma 2 : Prinsip-prinsip administrasi negara (1927-1937).
3. Paradigma 3 : Administrasi negara sebagai ilmu politik (1950-1970).
4. Paradigma 4 : Administrasi Negara sebagai ilmu administrasi (1956-1970).
5. Paradigma 5 : Administrasi negara sebagai administrasi negara (1970-1990).
6. Paradigma 6 : *Governance* (1990-sampai sekarang)

Paradigma I dikotomi Politik/Administrasi Negara (1900-1926)

Publikasi buku oleh Frank J. Goodnow dan Leonard D. White memulai Periode Paradigma 1. Goodnow mengatakan dalam bukunya *Politics Administration* (1900) bahwa pemerintah memiliki dua fungsi. Menurutnya, "politik" harus berkaitan dengan kebijaksanaan atau berbagai masalah yang berkaitan dengan tujuan negara. Sementara pemerintah harus terlibat dalam menjalankan kebijaksanaan tersebut. Akibatnya, pemisahan kekuasaan adalah dasar dari perbedaan. Paradigma pertama menekankan lokus, atau tempat, di mana

administrasi negara berada. Goodnow dan pengikutnya berpendapat bahwa administrasi negara harus berkonsentrasi pada birokrasi pemerintahan.

Hasil paradigma 1 menghubungkan pilihan politik dan administrasi dengan pilihan nilai dan fakta, yang memperkuat pemikiran tentang pilihan ini. Segala sesuatu yang dipelajari oleh para ahli administrasi negara di lembaga eksekutif akan memberi warna dan legitimasi keilmiah dan kefaktualan administrasi negara; studi pembuatan kebijakan publik akan menjadi pekerjaan para ahli ilmu politik.

Paradigma II Prinsip-Prinsip Administrasi Negara (1927-1937)

Inilah saat administrasi mencapai puncak kejayaannya, seperti yang ditunjukkan oleh paradigma 2. Kemampuan manajerialnya membuat para ahli administrasi negara diterima baik oleh industri maupun pemerintah selama tahun 1930-an dan awal 1940-an. Keahlian dalam bentuk prinsip-prinsip administrasi semakin menjadi fokus bidang ini. Lokasi administrasi negara berlaku di mana pun, karena administrasi dan prinsipnya tetap.

Sementara Gulick dan Urwick menganggap prinsip administrasi penting, penerapan mereka tidak penting. Fokus lebih penting daripada lokus”. Garis besar dari tulisan ini adalah bahwa ada prinsip-prinsip yang dapat ditemukan secara induktif dari kajian organisasi manusia yang menentukan susunan semua jenis asosiasi manusia. Prinsip-prinsip ini dapat dipelajari sebagai masalah teknis, tanpa memandang tujuan, orang yang ada di dalamnya, atau undang-undang, teori sosial atau politik yang mendasari terciptanya asosiasi tersebut. Gulick dan Urwick memberikan delapan prinsip administrasi dalam anagram singkat yaitu POSDCORB.

Paradigma III Administrasi Negara Sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Administrasi negara mengabaikan kritik konseptual yang tajam. Hasilnya adalah birokrasi pemerintah, atau penentuan lokus, diperbarui lagi, dan akhirnya kehilangan fokusnya. Praktiknya, teori dan data dari administrasi negara harus dipatuhi batas-batas budaya. Salah satu perbedaan kedua adalah bahwa administrasi negara secara keseluruhan, khususnya dalam konteks analisis administrasi, menghadapi tantangan antara praktik dan teori.

Paradigma IV Administrasi Negara Sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Suatu kenyataan penting dalam paradigma ilmu politik dan ilmu administrasi adalah bahwa administrasi negara tidak unik dalam membatasi beberapa konsep yang lebih besar. Semua istilah penelitian dalam teori organisasi dan ilmu manajemen dikumpulkan dengan istilah "ilmu administrasi" di sini. Ilmu administrasi memberikan fokus, bukan lokus, sebagai paradigma. Administrasi dapat ditemukan di mana pun, seperti yang ditunjukkan oleh paradigma 2, di mana fokus lebih penting daripada lokus. Ini berarti bahwa bidang ilmu administrasi niaga akan menggabungkan bidang ilmu administrasi negara. Sebagai bagian dari ilmu administrasi, apakah bidang studi yang memperhatikan elemen keuntungan ini cukup memperhatikan nilai kepentingan umum yang penting? Para ahli administrasi negara sekarang mulai menyadari bahwa istilah "negara" dalam administrasi negara tidak lagi memiliki arti institusi seperti pada masa lalu. Ini sekarang memiliki arti filosofis, normatif, dan etika.

Paradigma V Administrasi Negara Sebagai Administrasi Negara (1970-Sekarang)

Para ahli administrasi negara semakin berfokus pada bidang ilmu lain yang terkait dengan administrasi negara, seperti ilmu politik, ekonomi politik, proses pembuatan kebijakan negara, serta analisis dan perkiraan pengeluaran kebijakan. Fokus dan lokus, serta hubungannya dengan paradigma terakhir dalam administrasi negara Membicarakan administrasi negara menggunakan paradigma kontemporer yang sedang digunakan. Paradigma ini menekankan teori organisasi dan ilmu manajemen, dengan fokus pada kepentingan umum dan urusan umum. Pada akhirnya, administrasi negara telah berkembang menjadi bidang ilmu yang berbeda.

Paradigma VI *Governance* (1990-Sekarang)

Good Governance merupakan paradigma baru dan merupakan ciri yang perlu diterapkan di dalam administrasi publik yang diantaranya adalah agar pelaksanaan kebijakan publik (formulasi, implementasi dan evaluasi), sistem pemerintahan, pelayanan hingga aspek administrasi lainnya dapat berjalan dengan baik dalam rangka untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat terkhusus rakyat Indonesia. Di Negara kita Good Governance mulai dikenal secara lebih dalam yaitu sekitar tahun 1990-an. Good Governance di Indonesia adalah sebagai wacana penting yang muncul dalam berbagai pembahasan, diskusi, penelitian, dan seminar, baik dilingkungan pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat termasuk dilingkungan akademisi. Begitu banyak prinsip Good Governance yang direkomendasikan oleh para ahli, tak terkecuali oleh badan United Nation Development Programe atau yang dikenal dengan sebutan UNDP. Menurut UNDP, prinsip Good Governance mengandung sembilan prinsip yaitu:

1. *Participation*
2. *Rule of Law*

3. *Transparency*
4. *Responsiveness*
5. *Consensus orientation*
6. *Equity*
7. *Effectiveness and efficiency*
8. *Accountability*
9. *Strategic vision* (Karya Pamungkas & Rosyanfikri, 2022).

Untuk memperjelas paradigma administrasi publik, di bawah ini akan ditampilkan paradigma administrasi publik beserta maknanya:

Tabel 2.1: Paradigma Administrasi Publik dan Maknanya

Paradigma	Makna
Prinsip-prinsip Administrasi Publik dan Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi	Birokrasi
Dikotomi Politik-Administrasi	Pemerintah
Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik dan Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik	Negara
Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik, Administrasi Publik sebagai Manajemen Publik, Administrasi Publik sebagai Publik Pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Negara-Masyarakat

Sumber: (Hastiyanto, 2019).

2.3 Manajemen Publik

Bagian dari administrasi publik adalah manajemen publik, yang berfokus pada fungsi-fungsi dan proses yang dilakukan oleh organisasi publik. Pengertiannya lebih luas dari manajemen publik dan mencakup aspek politik, sosial, budaya, dan hukum yang mempengaruhi organisasi publik. Namun, manajemen publik hanya mencakup perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengisian staf (*staffing*), pengarahan (*directing*), pengkoordinasian (*coordinating*), pelaporan (*reporting*), dan penganggaran (*budgeting*). Saat ini, bagaimanapun, ide-ide ini telah berkembang menjadi analisis kebijakan, analisis

manajemen keuangan, analisis informasi, dan analisis hubungan luar dan dalam (Nashuddin, 2016).

Seperti manajemen sumber daya manusia pemerintah, manajemen publik juga berfokus pada upaya organisasi untuk mengatur pengelolaan sumber daya yang ada dalam organisasi agar organisasi dapat mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Manajemen sumber daya manusia pemerintah bertujuan untuk mengoptimalkan kerja pegawai di sektor publik dari aspek fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengendalian, atau pengawasan (Nahrudin, 2018).

Tugas manajemen publik adalah untuk menjelaskan sistem dan manajemen yang digunakan oleh organisasi nirlaba dan sektor publik. Cabang keilmuan yang lebih luas, administrasi publik, disebut dengan istilah manajemen publik. Manajemen publik sebenarnya adalah keilmuan yang muncul dari pemikiran yang sederhana. Dalam kebanyakan kasus, manajer publik bertanggung jawab untuk mengatur berbagai aspek organisasi sektor publik. Penelitian tentang cara orang mengelola organisasi sektor publik (A. F. Wijaya & Danar, 2017).

Berbeda dengan administrasi, manajemen berarti mencapai hasil, dan administrasi berarti mengikuti arahan. Allison menyatakan bahwa terdapat tiga fungsi manajemen umum adalah strategi, pengelolaan komponen internal, dan pengelolaan komponen eksternal. Fungsi-fungsi ini akan dibahas lebih lanjut di bawah ini:

1. Strategi

- a. Tentukan prioritas dan tujuan organisasi berdasarkan kapasitas dan lingkungan eksternal.
 - b. Tentukan rencana operasional yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.
2. Mengelola Komponen/bagian Internal
- a. Mengorganisasikan dan menyusun staf: dalam mengorganisasikan, manajer membuat struktur (unit dan jabatan yang diberi wewenang dan tanggung jawab) dan prosedur untuk mengkoordinasikan kegiatan dan mengambil tindakan. Dalam pembagian karyawan, ia berusaha untuk menyesuaikan orang yang tepat dengan pekerjaan utama.
 - b. Mengarahkan pegawai dan sistem manajemen kepegawaian: kapasitas organisasi terletak pada anggotanya, serta keahlian dan pengetahuan mereka. Dengan menggunakan sistem manajemen kepegawaian, organisasi dapat merekrut, menyeleksi, mensosialisasikan, melatih, memberikan kompensasi, menghukum, dan mengeluarkan modal manusianya. Dengan demikian, modal manusia ini memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuannya dan untuk menanggapi arahan khusus dari manajemen.
 - c. Mengontrol kinerja: Sistem informasi manajemen seperti akuntansi, laporan, dan statistik, anggaran modal dan operasional, penilaian kinerja, dan evaluasi produk membantu membuat keputusan dan mengukur kemajuan ke arah tujuan.
3. Mengelola Konstituen Eksternal

- a. Untuk mencapai tujuan unit mereka, manajer harus berkomunikasi dengan manajer unit lain dalam organisasi yang lebih besar di atas, di samping, dan di bawah. Ini terkait dengan wewenang dan otoritas umum yang berkaitan dengan unit “eksternal” organisasi.
- b. Berhubungan dengan organisasi independen termasuk usaha swasta, kelompok kepentingan, dan badan-badan dari cabang lain atau tingkat pemerintahan yang dapat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya.
- c. Terkait dengan media dan publik, di mana tindakannya, persetujuan, atau kepatuhannya diperlukan (Setya & Haryanto, 2021).

Pekerjaan yang saat ini dilakukan oleh pegawai negeri membutuhkan istilah “manajemen” untuk mendukung pelaksanaan reformasi yang komprehensif. Fokus pada hasil dan membuat setiap orang bertanggung jawab atas apa yang mereka capai. Ada beberapa elemen agenda manajemen yang perlu dipertimbangkan. (Darumurti, 2018), yaitu:

1. Dasar ekonomi manajerialisme. Dasar manajerialisme dikritik dalam dua aspek utama. Pertama, bahwa ekonomi bukanlah ilmu sosial dan harus digunakan dengan salah untuk pemerintah. Kedua, bahwa penerapan ekonomi pada pemerintah salah dipahami.
2. Dasar manajemen swasta. Sumber utama adalah manajerialisme yang berasal dari model bisnis swasta. Sektor publik berbeda dari sektor swasta, sehingga model manajemen generik atau sektor swasta tidak relevan untuk operasionalnya. Ada perbedaan antara keduanya yang membatasi apa yang

digunakan dan berhasil digunakan. Sektor publik selalu mengadopsi prinsip administrasi dari sektor swasta. Banyak teori tentang sektor swasta tidak dapat diterapkan pada sektor publik. Namun, ini tidak berarti bahwa sektor publik harus dikelola secara konvensional. Setiap metode harus disesuaikan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru.

3. *Neo-Taylorisme*. Ide-ide Taylor tentang manajemen ilmiah dikritik sebagai manajerialisme. Ada yang berpendapat bahwa menggunakan teori ini berarti mengabaikan evolusi perilaku organisasi sejak Taylor. Di awal abad ke-20, sistem Taylor digunakan oleh pelayanan publik karena sesuai dengan birokrasi formal.
4. Politisasi Perubahan sektor publik mencakup “mempolitisasi”nya; melibatkannya dalam masalah politik partai. Sekarang, pemimpin politik mulai memilih kepala departemen mereka dengan lebih sering dan mengharuskan mereka untuk menyukai tujuan politik mereka. Ini menghilangkan fokus model konvensional pada administrasi non-partisan dan netral.
5. Berkurangnya akuntabilitas. Ini keprihatinan tentang apakah konsep dan prosedur manajerial baru sesuai dengan sistem akuntabilitas. Ada beberapa kesulitan di sini, konflik dapat terjadi antara konsep manajemen publik dan akuntabilitas publik. Akuntabilitas menjadi masalah nyata, meski tidak banyak karena sistem lama sangat tidak realistis dan tidak menjamin akuntabilitas sama sekali.

6. Masalah implementasi. Sejauh ini perubahan manajerial dimulai dari atas, kurang memperhatikan pada implementasi. Perbaikan strategi atau penganggaran dapat terjadi di atas, tetapi pada tingkatan lebih rendah, implementasi atau manajemen kinerja juga diperlukan. Evaluasi program masih dianggap tidak biasa dan ketika dijalankan belum komprehensif. Pelatihan yang lebih baik harus terjadi sebagai bagian keseluruhan paket, terutama pelatihan manajemen bagi staf senior, tetapi ketika sumber daya dikurangi, kegiatan tersebut dianggap barang mewah.
7. Spesifikasi yang tidak jelas. Kritik terakhir adalah spesifikasi yang tidak jelas tentang model manajerial. Tidak ada definisi nyata tentang manajemen publik baru atau manajerialisme. Ada sejumlah daftar bentuk kegiatan yang dicakup pengukuran kinerja, insentif, penganggaran program dan seterusnya, tetapi tidak ada definisi yang jelas. Namun, manajemen publik baru tidak sama dengan administrasi publik.

Hyde dan Shafritz, berpendapat bahwa manajemen publik mengalami pergeseran selama tahun 1990-an, yang ditunjukkan oleh beberapa faktor penting yang akan sangat sulit, antara lain:

1. Manajemen publik sebagai privatisasi alternatif untuk penyediaan layanan publik oleh pemerintah.
2. Manajemen publik dapat diterima secara rasionalitas dan akuntabilitas.
3. Manajemen publik sebagai *planning* (perencanaan) dan control.
4. Manajemen publik sebagai penganggaran (*budgeting*) dan keuangan (*financial*).

5. Produktivitas sumber daya manusia melalui manajemen publik (Rara Karlina, 2021).

Ada banyak persamaan antara manajemen publik dan swasta, tetapi ada juga perbedaan yang signifikan. Ini termasuk perbedaan dalam konteks, orientasi nilai, dan sasaran pelayanan. Allison menulis beberapa hal yang membedakan manajemen publik dan swasta. Di antara perbedaan tersebut adalah:

1. Perspektif waktu. Dibandingkan dengan manajer swasta, manajer publik memiliki jangkauan waktu yang lebih pendek dalam hal agenda dan kepentingan politik.
2. Lama waktu pelayanan. Manajer yang ditunjuk secara politis memiliki masa kerja yang relatif singkat, sementara manajer swasta cenderung memiliki masa kerja yang lebih lama.
3. Standar ukuran keberhasilan. Standar dan kriteria untuk mengukur keberhasilan manajemen swasta lebih jelas dan mudah diperdebatkan daripada manajemen publik.
4. Personalia. Selain pegawai yang diangkat melalui proses, birokrasi publik juga memiliki pejabat negara yang diangkat secara politis.
5. Tekanan pelayanan. Tekanan pelayanan di organisasi swasta cenderung menekankan aspek pencapaian efisiensi organisasi, yang diwakili penghitungan untung rugi. Sementara itu organisasi publik lebih menekankan pada pemerataan atau keadilan. Sehingga pencapaian sasaran ini menjadi sulit diukur.

6. Prosesnya. Proses organisasi publik dalam arti sepak terjang pelaksanaan pekerjaan di organisasi publik lebih sering menjadi sorotan publik dibanding organisasi swasta. Dengan kata lain sifat manajemen publik lebih terbuka terhadap sorotan masyarakat dibanding manajemen swasta.
7. Peran media masa. Manajer publik lebih sering menghadapi pers dibanding manajer swasta.
8. Tekanan dalam pengambilan keputusan. Bagi manajer publik lebih sulit untuk mencari kompromi terhadap tekanan yang datang dari berbagai arah dan lebih sulit menciptakan koalisi dengan orang dalam atau orang luar supaya dapat mengambil keputusan yang baik bagi kelangsungannya. Kontradiksi-kontradiksi dalam pengambilan keputusan seperti itu lebih jarang dihadapi di manajer swasta, sehingga arus keputusan lebih tegas mengalir dari atasan kepada bawahan.
9. Kebebasan menentukan Langkah. Lembaga legislatif dan yudikatif sering menyoroti manajer publik, tetapi manajer swasta tidak.
10. Kejelasan misi. Sebagian besar, tujuan organisasi publik tidak sejelas tujuan organisasi swasta. Tujuan organisasi publik untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, misalnya, lebih abstrak dan lebih sulit untuk diukur, sedangkan tujuan organisasi swasta termasuk mendapatkan keuntungan, mengiklankan dengan baik, dan menjaga organisasi tetap beroperasi. (Fadhly, 2019).

2.4 Old Public Administration (OPA)

Tokoh penting dalam perkembangan ilmu administrasi publik termasuk Woodrow Wilson dengan bukunya *"The Study of Administration"* (1887) dan FW Taylor dengan *"Principles of Scientific Management"* (1883). Paradigma administrasi publik lama (OPA) juga dikenal sebagai administrasi publik tradisional atau klasik. Paradigma ini menganggap administrasi publik sebagai pemain utama. Namun, salah satu kritik teori klasik administrasi publik adalah bahwa penyelenggaraan administrasi publik menjadi tidak efisien karena sumber pembiayaan berasal dari pungutan pajak masyarakat. (Asni, 2018).

Konsep lama administrasi publik yang bertujuan untuk memberikan pelayanan secara netral dan profesional serta melaksanakan kebijakan. Permulaan administrasi publik adalah titik awal administrasi publik klasik. Dalam buku Teguh Kurniawan "Pergeseran Paradigma Administrasi Publik: dari perilaku model klasik dan NPM ke Good Governance", administrasi publik awalnya dikenal dengan konsep yang sangat legalistik dan banyak aturan yang mengikat, struktur organisasi yang hierarkis yang menghalangi koordinasi berbagai fungsi, dan dominasi pemerintah dalam banyak hal, seperti memberikan pelayanan publik. (Supriyadi, 2021).

Politik dan kebijaksanaan adalah subjek ilmu politik, dan ilmu administrasi publik terutama berfokus pada organisasi, kepegawaian, dan penyusunan anggaran dalam birokrasi dan pemerintahan. Lokasi paradigma ini menunjukkan keadaan yang ideal untuk administrasi publik. Pada saat ini, ada perbedaan yang jelas antara pemerintahan Negara dan politiknya. Buku *Politics and Administration* oleh Frank J. Goodnow dan Leonard D. White menyatakan bahwa politik dan administrasi

adalah dua fungsi utama pemerintah yang berbeda. Buku ini menandai fase ini. Ditambahkan, Goodnow berpendapat bahwa administrasi publik seharusnya berpusat pada birokrasi pemerintah (Supriyadi, 2021).

Pemerintah mengambil alih semua aspek kehidupan masyarakat, menjadikannya penguasa tunggal. Pemerintah dapat membuat peraturan dan kebijakan secara penuh tanpa melibatkan pihak lain seperti perwakilan dari sektor bisnis, terutama partisipasi masyarakat. Ini menunjukkan seberapa besar anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah untuk membiayai organisasi birokrasi yang sering kali “gemuk” dengan berbagai fungsi yang terlalu mahal dan tidak memiliki tupoksi yang jelas. Selain itu, rantai meja-meja pelayanan yang rumit membuat masyarakat semakin jauh dari pemerintah, seolah-olah ada pembatasan yang jelas antara pemerintah dan masyarakat, dan ini akan membuat masyarakat sulit untuk menempuh pemerintah. Ini jelas memberatkan masyarakat karena mereka sebagai pembayar pajak harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk gaji (Prasetyo et al., 2023).

Seiring dengan kemajuan keadaan sosial di masyarakat dan proses pembentukan institusi yang lebih baik, konsep Old Public Administration (OPA) dianggap tidak relevan lagi. Konsep OPA lebih terfokus pada kekuasaan kelompok yang dominan dalam masyarakat, tetapi tidak tanggap terhadap kekuasaan di luar struktur kekuasaan yang ada di setiap jenjang pemerintahan. Ini karena peradaban manusia berkembang sebagai hasil dari kemajuan dan perkembangan ilmu administrasi. Administrasi berkembang secara individual dan nasional. Misalnya,

antara masyarakat lokal Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Eropa (Sagena et al., 2023).

Denhardt dan Denhardt menyebut masyarakat sebagai “Dependent” atau “Followers”, dan OPA menganggapnya sebagai “Kliens”. Akuntabilitas, menurut pandangan lama tentang administrasi publik, ditujukan untuk membangun birokrasi yang efisien, disiplin, dan objektif. Namun, menurut Dwiyanto, jika tujuan optimalisasi dicapai, gagasan ini akan gagal karena akan menghasilkan manajemen organisasi publik yang paternalistis, kaku, atau ketat. (Engkus, 2022).

Denhardt juga mengungkapkan karakteristik OPA diantara-Nya:

1. Fokus utama adalah penyediaan layanan publik melalui organisasi atau badan resmi pemerintah.
2. Kebijakan publik administrasi negara didefinisikan sebagai penataan dan pelaksanaan kebijakan yang berfokus pada tujuan politik.
3. Administrator publik memainkan peranan yang sangat terbatas dalam perumusan kebijakan publik dan pemerintahan.
4. Pelayanan publik mesti dilaksanakan oleh administrator yang bertanggung jawab kepada pejabat politik negara.
5. Administrator bertanggung jawab kepada pimpinan pejabat politik.
6. Program-program publik diimplementasikan melalui organisasi yang bertingkat dengan pengawasan yang ketat oleh pimpinan setiap organisasi.
7. Nilai pokok, efisiensi dan rasionalitas diutamakan.
8. Sistem yang tertutup sehingga melibatkan warga negara terbatas.

9. Peranan administrator melaksanakan prinsip-prinsip *planning* (pelaksanaan), *organizing* (pengorganisasian), *staffing* (sumber daya manusia), *directing* (pengarahan), *coordinating* (koordinasi), *reporting* (pelaporan) dan *budgeting* (penganggaran) (Dani, 2022).

Sugandi mengatakan bahwa karena pemerintah tetap memiliki otoritas penuh untuk membuat kebijakan, kelemahan OPA adalah jenis pemerintahan yang kaku dan sentralistis yang dianut oleh Administrasi Publik Lama. Ini berarti adanya kebijakan yang menguntungkan pemerintah saja tetapi tidak dapat menyejahterakan masyarakat umum. Karena memiliki fondasi filosofis dan ideologis yang tidak sesuai dengan administrasi negara yang menerapkan prinsip responsif dan keterbukaan, paradigma administrasi publik lama tidak relevan untuk memecahkan masalah publik. Selain itu, karena birokrasi dipilih secara objektif, dilindungi dari kewenangan hukum, dan memiliki masa depan yang terjamin, OPA memberikan stabilitas yang tinggi. Untuk sementara, birokrasi yang kompleks, formal, dan berdasarkan dokumen resmi akan mencegah politisi dan birokrasi karier menyalahgunakan wewenang mereka. Negara kerajaan juga dapat menggunakan administrasi ini. Selain itu, kepentingan individu atau kelompok tertentu mungkin tidak memengaruhi birokrasi karena sifat netral dari administrasi publik konvensional (Sagena et al., 2023).

Keterkaitan OPA dengan pemberdayaan Masyarakat terletak pada posisi masyarakat hanya sebagai penerima, namun peran pemerintah sangat dominan dan berkuasa. Hal ini menyebabkan peran masyarakat sangat minim dalam pembangunan yang dijalankan sehingga masyarakat kurang diberdayakan. Hal

senada yang disampaikan Toha (2018) bahwa di dalam OPA administrasi publik dijalankan dengan sangat efisien dan tertutup sehingga keterlibatan masyarakat atau warga negara sangat terbatas.

2.5 *New Public Management*

Secara umum dianggap sebagai suatu pendekatan dalam administrasi publik, New Public Management (NPM) didefinisikan sebagai privatisasi sejauh mungkin atas aktivitas pemerintah. NPM adalah sistem manajemen desentral yang menggunakan perangkat manajemen baru seperti controlling, benchmarking, dan lean management. NPM menerapkan pengetahuan dan pengalaman dari manajemen bisnis dan bidang lain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan (Taufiqurokhman & Satispi, 2018).

Pengertian *new publik management* ini telah mengalami berbagai perubahan orientasi menurut Ashbuerner, Ferlie, Pettgrew dan Filzgerald dalam Keban (Marliani, 2018), yaitu:

1. *Orientasi The Drive* yaitu mengutamakan efisiensi sebagai ukuran kinerja.
2. *Orientasi Downsizing and Decentralization* yaitu mengutamakan penyederhanaan struktur, meningkatkan fungsi, dan memberikan wewenang kepada unit yang lebih kecil untuk beroperasi dengan cepat dan tepat.
3. *Orientasi in Search of Excellence* yaitu menggunakan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk mengoptimalkan kinerja.
4. *Orientasi Publik Service* yaitu menekankan kualitas, tujuan, dan prinsip yang ingin dicapai organisasi publik, memberikan perhatian yang lebih

besar pada keinginan, kebutuhan, dan partisipasi pengguna dan warga masyarakat, termasuk wakil mereka menekankan pembelajaran sosial dalam pemberian pelayanan publik dan penekanan pada evaluasi kinerja yang berkelanjutan, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas.

Pendekatan NPM terhadap manajemen publik menjadi bahan kritik untuk birokrasi. Selama beberapa waktu, birokrasi telah dikaitkan dengan manajemen sektor publik itu sendiri. Ini dianggap dikaitkan dengan keengganan untuk maju, mekanisme pengambilan keputusan top-down, dan kompleksitas struktur jabatan dan tanggung jawab. Birokrasi juga dituduh tidak memenuhi harapan publik. NPM sebagai sebuah gerakan berfokus pada pengadopsian teknik manajemen perusahaan swasta yang unggul untuk diterapkan dalam sektor publik dan administrasinya. Selama bertahun-tahun, pemerintah telah distereotipkan sebagai kaku, birokratis, inefisien, dan tidak efisien. Namun, sektor swasta telah berkembang dengan lebih cepat karena mereka lebih suka bersaing dan menemukan peluang baru. Akibatnya, sektor swasta banyak melakukan inovasi dan prinsip manajemen baru (Rachman, 2021)

Manfaat NPM mencakup banyak konsep, termasuk pola-pola pilihan kebijakan, penerapan kelembagaan ekonomi pada manajemen publik, dan desain organisasi dan manajemen. Menurut David Osborne dan Ted Gaebriel ada beberapa alasan untuk mereformasi pandangan tersebut yaitu:

1. Administrasi publik harus fokus pada usaha mencapai tujuan dan bukan hanya menyesuaikan pada prosedur

2. Untuk mencapai tujuan, administrasi publik harus berorientasi pada pasar dan penyedia barang kebutuhan serta jasa
3. Publik harus dilihat sebagai pelanggan sehingga pemerintah harus lebih responsif dalam pemenuhan kebutuhan
4. Keterkaitan pandangan mengenai orientasi pasar, fungsi yang dijalankan pemerintah dalam mengarahkan dan bukan mengatur
5. Pemerintah harus diatur-ulang, sentralisasi birokrasi dalam hal kontrol terhadap penganggaran, kepegawaian, audit, pengadaan dan penganggaran yang tidak berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Keterlibatan pihak ketiga seperti lembaga swadaya masyarakat, perusahaan/swasta harus dilibatkan dalam pelayanan, penerapan kebijakan dan pemberlakuan peraturan yang ada.
6. Dengan adanya deregulasi dan berkurangnya peran sentral pemerintah, para masyarakat public/administrator publik harus berusaha lebih kreatif untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
7. Secara umum, administrasi publik harus berubah dan ciri sikap yang kaku menjadi lebih fleksibel, inovatif, penekanan pada penyelesaian masalah, dan menciptakan jiwa usaha. (Rachman, 2021)

Keterkaitan Pemberdayaan masyarakat dengan NPM terlihat pada keterlibatan masyarakat secara penuh dalam pembangunan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Osborne & Gaebler, yang mana Salah satu prinsip dalam *Reinventing Government* yang sangat dekat dengan pelibatan masyarakat adalah "Pemerintahan milik warga negara: memberikan wewenang dari pada memberikan

pelayanan." Pada dasarnya, pemerintah dimaksudkan untuk memungkinkan masyarakat untuk mengendalikan lingkungan mereka sendiri dan memenuhi kebutuhan mereka sendiri agar mereka tidak bergantung pada pemerintah (Sukoco, 2024).

2.6 *New Public Service*

Publik servants membawa demokrasi, bukan layanan pelanggan. Pemerintahan dan institusi pemerintahan seharusnya beroperasi secara demokratis, melayani rakyat dengan cara yang adil, merata, tidak diskriminatif, jujur, dan akuntabel. Bukan seperti perusahaan. Mereka mengklaim ini karena:

1. Nilai-nilai demokrasi, kewarganegaraan, dan kepentingan publik adalah merupakan pilar utama dalam operasi pemerintahan.
2. Pegawai pemerintah dan pelayan publik dimotivasi oleh prinsip-prinsip ini untuk melayani masyarakat secara lebih adil, merata, jujur, dan bertanggung jawab. (Taufiqurokhman & Satispi, 2018).

Menurut Denhardt & Denhardt (Taufiqurokhman & Satispi, 2018), Administrator publik bertanggung jawab untuk melayani dan memberdayakan warga negara melalui pengelolaan organisasi publik dan penerapan kebijakan publik karena masyarakat adalah pemilik kepentingan publik yang sebenarnya. Perspektif baru tentang administrasi publik, yang dikenal sebagai publik service, muncul sebagai hasil dari perubahan perspektif tentang posisi warga negara, nilai, dan peran pemerintah. Orang-orang yang tinggal di negara ini seharusnya menjadi prioritas utama. Penekanan seharusnya lebih pada membangun institusi publik yang

berbasis integritas dan responsivitas daripada membedakan antara mengarahkan dan mengayuh.

Denhardt & Denhardt secara ringkas menyatakan bahwa perspektif *new publik service* (NPS) dapat dilihat dari beberapa prinsip-prinsip diantaranya adalah:

1. *Serve citizens, not customers.* Karena kepentingan publik berasal dari pembicaraan tentang nilai-nilai bersama daripada akumulasi kepentingan pribadi individu, abdi masyarakat tidak sekadar memenuhi permintaan pelanggan. Sebaliknya, mereka berkonsentrasi pada membangun kolaborasi dan kepercayaan dengan warga negara.
2. *Seek the publik interest.* Administrasi publik harus bekerja sama untuk membangun kepentingan publik bersama. Tujuannya adalah untuk menciptakan kepentingan bersama dan tanggung jawab bersama daripada menemukan solusi cepat yang diarahkan oleh keputusan individu.
3. *Value citizenship over entrepreneurship.* Dibandingkan dengan manajer bisnis yang bertindak seolah-olah uang masyarakat milik mereka sendiri, abdi masyarakat dan warga negara yang berkomitmen untuk berkontribusi pada masyarakat lebih baik mengelola kepentingan publik.
4. *Think strategically, act democratically.* Melalui proses dan upaya kolektif, program dan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan publik dapat dicapai secara efisien dan bertanggung jawab.
5. *Recognize that accountability is not simple.* Menurut pandangan ini, abdi masyarakat seharusnya lebih peduli daripada mekanisme pasar. Mereka

juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan, nilai-nilai kemasyarakatan, standar politik, dan kepentingan warga negara.

6. *Serve rather than steer*. Penting sekali bagi pelaksana kebijakan untuk menggunakan kepemimpinan yang berbasis pada nilai bersama dalam membantu warga negara mengemukakan kepentingan bersama dan memenuhinya daripada mengontrol atau mengarahkan masyarakat ke arah nilai baru.
7. *Value people, not just productivity*. Keberhasilan dalam jangka panjang lebih mungkin dicapai oleh organisasi publik dan jaringannya melalui proses kerja sama dan kepemimpinan yang didasarkan pada penghargaan bagi semua orang (Taufiqurokhman & Satispi, 2018).

Pemberdayaan Masyarakat terlihat jelas posisinya pada paradigma NPS. Menurut Denhardt & Denhardt menuliskan bahwa NPS lahir dari kesadaran akan pentingnya meletakkan masyarakat pada posisi sebagai pemilik kepentingan publik yang sebenarnya sehingga administrasi publik perlu untuk lebih memberdayakan Masyarakat (Sukoco, 2024). Menurut (Tresiana & Duadji, 2016), perspektif NPS ini menganggap pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan, baik dalam perencanaan maupun implementasi inisiatif untuk mencapai tujuan masyarakat.

2.7 Governance

Sebagai bagian dari bidang ilmu administrasi, administrasi sebagai bentuk *governance* menjadi sangat efektif dalam menggerakkan masalah-permasalahan kontemporer. Pemerintahan negara tidak hanya terdiri dari lembaga pemerintah

negeri, tetapi juga dapat mencakup semua jenis organisasi, terutama yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan publik. Kita harus memahami bahwa lembaga non-pemerintah harus terlibat dalam pembuatan kebijakan publik. Selain itu, dalam penerapan kebijakan publik, ilmu administrasi sebagai bentuk pemerintahan meletakkan proses kebijakan sebagai pusat atau kebutuhan utama. Selain itu, dapat digunakan untuk menilai bagaimana kekuasaan ekonomi, politik, dan administratif digunakan untuk menyelesaikan masalah dan kepentingan publik lainnya (B. Nugraha et al., 2022).

Goodsell mengatakan bahwa paradigma administrasi publik kontemporer adalah paradigma *governance* yang menghendaki terdistribusinya kekuasaan atas tiga domain secara seimbang, yaitu pemerintah, masyarakat sipil dan swasta (Syafari, 2019). Sujarwoto dan Yumarni memberikan penjelasan dasar tentang teori pemerintahan: penyebaran, kolaborasi, dan koordinasi kekuasaan. Dalam hal ini, kekuasaan yang semula didominasi oleh negara didistribusikan kepada aktor-aktor di luar negara, baik di sektor swasta maupun masyarakat sipil. Menurut paradigma ini, ketiga pilar tersebut harus memiliki peran dan kekuasaan yang seimbang. Akibatnya, diharapkan ada keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Syafari, 2017).

Paradigma *governance* menghendaki adanya kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, swasta dan masyarakat madani (*civil society*) (Muhammadong, 2017). Paradigma administrasi publik menganggap pemerintahan sebagai cara baru untuk melihat pemerintahan. Dalam hal ini, sudut pandang baru tentang institusionalisme menimbulkan pergeseran perspektif dari pemerintahan ke

pemerintahan. Istilah "pemerintah", yang sebelumnya berarti pemerintah sebagai badan yang menjalankan pemerintahan sehari-hari, telah berubah seiring dengan kompleksitas masalah internal yang dihadapi oleh pemerintah. (Haboddin, 2015).

Paradigma ilmu administrasi publik terus berubah karena peran masyarakat semakin penting dalam pembangunan. Hal ini terlihat dari paradigma *governance* di mana menurut Wrihatnolo & Dwidjowijoto menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan gambaran nyata dari *good governance* yang bertujuan untuk mendemokratisasikan Pembangunan (Sukoco, 2024). Menurut (Sulistiyani, 2017), dalam *governance* masyarakat menjadi pilar yang harus diberdayakan dalam Pembangunan Bersama dengan pihak pemerintah dan swasta.

2.8 Pemberdayaan Masyarakat

Mempertimbangkan pemaparan para ahli di atas, jelas bahwa paradigma NPM mulai terlihat pemberdayaan masyarakat dan posisinya dalam NPS semakin jelas. Pemberdayaan juga merupakan paradigma yang berkembang dalam keilmuan administrasi publik modern seperti *governance* (*good governance*, *community governance*, *collaborative governance*) (Sukoco, 2024). Paradigma Administrasi Publik terus berkembang, dengan peran masyarakat semakin penting dalam pembangunan. Salah satu pilar administrasi pembangunan adalah pemberdayaan masyarakat, yang mengubah budaya administrasi pemerintah dengan fokus pada mengubah manusia dari objek ke subjek pembangunan (Ulum & Anggaini, 2020).

Konsep pemberdayaan (*empowerment*) mulai berkembang sekitar tahun 1970-an dan semakin populer dan terkenal pada awal abad ke 21. Konsep ini dipandang sebagai bagian dari aliran-aliran yang banyak dikenal oleh orang-orang

dengan aliran *post modernisme* yang bertitik berat pada sikap dan pendapatnya adalah anti sistem, anti struktur dan anti determinisme kepada dunia kekuasaan (Mulyawan, 2016). Prijono, S. Onny dan Pranarka, menyatakan bahwa pemberdayaan mengandung dua arti dan pengertian, yang *pertama* adalah *to give power or authority*, pengertian *kedua* adalah *to give ability to or enable*. Pengertian pertama meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang/belum berdaya dan mesti di berdayakan. Di sisi lain pengertian kedua adalah memberikan kesadaran, keberdayaan dan kemampuan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu hal (R. Sari, 2016).

Menurut Webster, pemberdayaan terjemahan dari kata “*empowerment*”, sedangkan memberdayakan adalah terjemahan dari “*empower*”. Kata *empower* mengandung dua pengertian yaitu:

1. *To give power* atau *authority to* atau memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain.
2. *To give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan (Hutomo, 2020).

Barnes menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan proses peningkatan kapasitas melalui desain program, hubungan, dan organisasi (Barnes, 2020). Hamid mengatakan bahwa pemberdayaan sebagai pemberian daya atau kekuatan kepada kelompok lemah agar lebih mandiri memenuhi kebutuhan hidupnya (Hendrawati Hamid, 2018). Payne juga mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya untuk mendorong seseorang untuk memiliki kapasitas, rasa percaya diri, kemandirian, dan

kemampuan untuk membuat keputusan yang berdampak pada hidupnya (Maskurin et al., 2016).

Pemberdayaan menurut Suharto terdiri dari dua hal, yaitu pembedayaan sebagai suatu proses dan pemberdayaan sebagai suatu tujuan. pemberdayaan sebagai suatu proses merupakan kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok yang lemah yang adab di dalam masyarakat, termasuk individu-individu atau kelompok-kelompok yang mengalami masalah kemiskinan dan keterbelakangan. Sedangkan pemberdayaan sebagai suatu tujuan yaitu pemberdayaan menunjuk pada keandalan, kemampuan atau hasil yang ingin di capai oleh perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya dan berhasil, memiliki kemampuan, kekuasaan dan pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berupa fisik, ekonomi, sosial maupun lingkungan (Pathony, 2020).

Konsep pemberdayaan tidak hanya mengarah secara individual (*individual self-empowerment*), tetapi juga secara kolektif (*collective self empowerment*). Semua itu harus menjadi bagian dari aktualisasi diri (*self-actualization*) dan keaktualisasian eksistensi manusia dan kemanusiaan lah yang menjadi tolok ukur normatif, struktural, dan substansial. Pemahaman tentang pemberdayaan masyarakat tidak bergantung pada keberdayaan masyarakat itu sendiri; pemberdayaan masyarakat membuat masyarakat lebih bergantung pada program atau bantuan, tetapi membuat mereka lebih percaya pada diri mereka sendiri. (Mulyawan, 2016).

Menurut perspektif dan situasi yang dihadapi oleh setiap individu atau kelompok, pemberdayaan dapat memiliki arti yang berbeda. Namun, yang paling

jelas dan paling mudah dipahami adalah bahwa istilah "daya" berasal dari kata "mampu", yang berarti kemampuan atau kemampuan untuk mandiri dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik. Di perkotaan dan di pedesaan, pemberdayaan memiliki banyak hal yang sama, seperti peningkatan ekonomi, pendidikan, akses sebagai warga, dan hubungan yang mendorong perilaku politik. Namun, pemerintah telah mengubah konsep pemberdayaan menjadi pemberdayaan melalui pemulihan nilai-nilai universal kemanusiaan dan tujuan untuk mengubah sikap dan perilaku seseorang menjadi lebih baik. Praktiknya tetap menggunakan konsep kesadaran dan keinginan dari dalam masyarakat, yang kemudian dikenal sebagai penilaian pertanian yang berpartisipasi (Sanjoyo, 2016).

Pemberdayaan dalam satu bidang tentu akan saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, misalnya pemberdayaan ekonomi pemberdayaan ekonomi juga harus memperhatikan pemberdayaan lingkungan agar tidak terjadi eksploitasi habis-habisan tidak terjadi eksploitasi habis-habisan terhadap sumber daya yang ada, atau ketika kita berbicara tentang pemberdayaan ekonomi seperti yang pemberdayaan ekonomi seperti yang terlihat pada sektor pariwisata, tentu tidak bisa dilepaskan dari pemberdayaan spiritual dan spiritual dan pemberdayaan sosial (Hani et al., 2021).

Mardikanto dan Soebiato (2017) mengatakan bahwa, Pemberdayaan adalah proses yang mencakup serangkaian tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk kelompok yang mengalami kemiskinan. Pemberdayaan didefinisikan sebagai sebuah proses di mana seseorang memiliki kemampuan untuk

berpartisipasi, memperoleh kesempatan, dan mendapatkan akses ke sumber daya dan layanan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Dengan cara ini, pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang direncanakan untuk meningkatkan skala dan meningkatkan utilitas item yang diberdayakan.

Pemberdayaan masyarakat bukan hanya tanggung jawab negara atau pemerintah tetapi juga swasta. Pemberdayaan merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa terutama pada negara yang berkembang termasuk negara Indonesia dikarenakan masih ada sebagian daerah di Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan (Untung, 2014). Pemberdayaan masyarakat adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan aset dan kemampuan masyarakat miskin sehingga mereka mau dan mampu mengakses berbagai sumber daya, permodalan, teknologi, dan pasar. Ini dilakukan melalui pendekatan pendampingan, peningkatan kapasitas pelayanan, dan pembelajaran tentang kemandirian. Hal ini mengandung makna bahwa pemberdayaan masyarakat keinginan untuk merubah diri dengan memanfaatkan segenap sumber daya yang ada agar terbebas dari kemiskinan dan kekurangan dibidang ekonomi dengan cara berkelanjutan. Tujuan dari pemberdayaan adalah agar masyarakat dapat mencapai peningkatan kesejahteraan dan terbebas dari kemiskinan dengan cara meningkatkan, kemauan, kemampuan dan keberanian, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat dengan atau tanpa adanya bantuan dari pihak luar komunitas demi terwujudnya suatu perbaikan kesejahteraan baik dari aspek ekonomi, sosial, fisik dan mental.

Pemberdayaan berarti membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat untuk membantu mereka menentukan masa depan mereka sendiri (Suparjan dan Suyatno, 2003). Memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk memilih jalan hidup mereka sendiri adalah konsep utama pemberdayaan.

Inti dari pemberdayaan masyarakat terbagi ke dalam tiga hal, yaitu *enabling* (pengembangan), *empowering* (memperkuat potensi atau daya), dan terciptanya kemandirian. Dari pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat bukan sekedar pemberdayaan yang hanya melepaskan tanggung jawab, namun harus secara berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengembangkan potensi yang ada dimasyarakat agar dapat bermanfaat secara maksimal yang efek dari pengembangan tersebut menciptakan kemandirian oleh masyarakat yang bersangkutan secara menyeluruh (Iriani, W., Warsono, H., & Lestari, 2013).

Pemberdayaan masyarakat menurut Zubaedi adalah upaya untuk meningkatkan martabat dan martabat orang miskin, membantu mereka keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari pemberdayaan adalah untuk membuat orang miskin tidak lagi miskin melalui berbagai program yang ditawarkan oleh pemerintah dan perusahaan swasta. (A. H. Rahmawati et al., 2016).

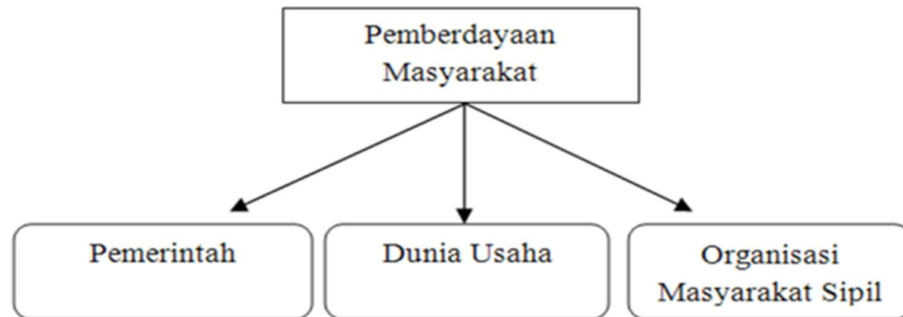
Pemberdayaan dalam konteks masyarakat merupakan suatu proses yang membangun sumber daya manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian

masyarakat. Dari definisi di atas dapat disimpulkan tiga hal mendasar dalam konteks pemberdayaan yaitu kemampuan masyarakat, perubahan perilaku dan pengorganisasian masyarakat. Mengenai kemampuan masyarakat memang merupakan hal yang mendasar, dalam hal ini kemampuan dapat dikelola dari yang tidak bisa menjadi bisa agar masyarakat tersebut dapat berdaya. Namun yang tidak kalah penting adalah perubahan perilaku dalam masyarakat, karena perubahan perilaku akan mencerminkan keberhasilan suatu pemberdayaan. Kemudian setelah kedua hal di atas dilakukan, maka selanjutnya adalah pengorganisasian masyarakat di mana masyarakat tidak akan dapat berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya dikomandoi satu arah yang disebut dengan nama organisasi. Tujuannya adalah agar adanya sinkronisasi dalam rangka melaksanakan program pemberdayaan di dalam masyarakat (Ilham & Hardi, 2020).

Pada dasarnya, pemberdayaan masyarakat tidak hanya di peruntukan kepada individual saja, melainkan juga secara berkelompok, sebagai bagian dari aktualisasi eksistensi manusia, yang dapat digunakan sebagai tolok ukur normatif, yang menempatkan konsep pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya untuk membangun eksistensi masyarakat sebagai aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam aktivitasnya, pemberdayaan masyarakat memerlukan pemahaman tentang hakikat manusia, yang akan membantu meningkatkan pemahaman tentang cara menerapkan berbagai program. (Hendra Hamid, 2018).

Pada dasarnya pemberdayaan dapat dilakukan oleh berbagai *stakeholders*, pemerintah dengan melalui kebijakan dengan berbagai macam program pemberdayaan dan perlindungan sosial, pihak swasta atau dunia usaha dengan

kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), Organisasi Masyarakat Sipil atau lebih dikenal dengan sebutan Lembaga Sosial Kemasyarakatan (LSM) dengan berbagai aktivitas sosialnya, dan lain sebagainya (Widayanti, 2022). untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah:



Gambar 2.2
Pelaku Pemberdayaan Masyarakat
Sumber: Widayanti (2022)

Gambar di atas menjelaskan bahwa konsep dari pemberdayaan terdiri dari minimal 3 multi aktor, yaitu Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab sebagai pelaksana pemberdayaan, dunia usaha sebagai pihak yang membantu pemerintah dalam meringankan bebannya serta organisasi kemasyarakatan yang merupakan representasi dari Masyarakat itu sendiri yang berposisi sebagai objek dari pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah maupun dunia usaha (swasta).

Program pemberdayaan masyarakat seharusnya berproses dan berhasil meningkatkan kesejahteraan, daya tahan, atau kemampuan kelompok sasaran untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga mereka dapat menciptakan kemandirian dalam masyarakat. Kemandirian berarti banyak hal, termasuk kemandirian sosial, budaya, hak bersuara, dan hak politik. Sekarang masyarakat telah memahami dan menetapkan hak politiknya sendiri untuk memilih pemimpin

terbaik di tingkat lokal dan nasional serta anggota legislatif yang akan mewakili rakyat. Masyarakat tidak lagi takut karena tekanan dari pihak-pihak tertentu untuk menentukan pilihan, atau karena iming-iming dan janji-janji yang hanyalah retorika atau omong kosong. Mereka juga tidak lagi takut karena sogokan dalam bentuk apa pun, seperti sembako, uang, dan pakaian. Pada akhirnya, tujuan dari program atau kegiatan pemberdayaan adalah agar masyarakat menjadi lebih mandiri dalam menentukan apa yang terbaik bagi mereka (Riska, 2020).

Pemberdayaan Masyarakat bukan hanya dipandang sebagai sesuatu yang umum, namun dalam Islam juga memberikan pandangan secara spesifik terhadap pemberdayaan. Islam mendorong pemberdayaan Masyarakat melalui tiga prinsip yaitu prinsip *ukhuwwah*, prinsip *ta'awun*, dan prinsip persamaan derajat (Sany, 2019). Dari ketiga prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Prinsip *ukhuwwah*, yang berarti persaudaraan dalam bahasa Arab. Konsep ini menyatakan bahwa setiap muslim adalah bersaudara satu sama lain meskipun tidak ada hubungan darah antara mereka. Rasa persaudaraan memastikan bahwa orang lain merasa sama dengan orang lain dan merekatkan silaturahmi dalam masyarakat.
2. Prinsip *ta'awun* yaitu mendorong manusia untuk membantu satu sama lain. Prinsip *ta'awun* ini adalah prinsip utama dalam membangun masyarakat yang kuat. Program pemberdayaan sebenarnya bertujuan untuk membantu individu dan komunitas yang membutuhkan bantuan dan pelatihan.
3. Prinsip persamaan derajat antar umat manusia. Iman dan takwa adalah satu-satunya syarat untuk kemuliaan yang ada di sisi Allah. Selain itu, kata-kata

di atas menekankan bahwa kekayaan dan harta pada dasarnya tidak menyebabkan perpecahan. Sebaliknya, harta dan kekayaan berfungsi sebagai alat untuk saling membantu dan tolong-menolong.

Tujuan pemberdayaan adalah untuk memberi komunitas dan masyarakat penerima program kemampuan untuk mengubah nasib individu atau kelompok dan meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidup mereka. Derajat keberdayaan yang paling penting adalah kesadaran dan keinginan mereka untuk berubah; tanpa ini, sulit bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya (Sany, 2019). Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan individu dan kelompok dalam masyarakat untuk menjadi mandiri dan berdaya saing. Tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk menciptakan kondisi di mana masyarakat dapat mengelola sumber daya yang mereka miliki, menyelesaikan masalah, dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan (Hardiyanti & Ma'ruf, 2021).

Tujuan utama pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kekuatan masyarakat, terutama kelompok lemah yang merasa tidak berdaulat karena faktor internal (persepsi mereka sendiri) dan eksternal (struktur sosial yang tidak adil menindas mereka). Untuk meningkatkan pemahaman kita tentang pemberdayaan, kita harus memahami konsep kelompok lemah dan faktor-faktor yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan pemberdayaan. Kelompok tertentu dianggap lemah atau tidak berdaya adalah seperti:

1. Lemah secara struktural, yaitu mereka yang memiliki kelas sosial ekonomi, gender, dan etnis yang rendah dan merupakan minoritas dan dianggap tidak adil atau tidak adil.
2. Lemah secara khusus, termasuk orang tua, anak-anak, remaja, penyandang cacat, gay dan lesbian, orang terasing, dan individu yang mengalami masalah dalam kehidupan pribadi atau keluarga mereka.
3. Lemah secara pribadi, termasuk individu yang menghadapi kesulitan pribadi atau keluarga (Hendrawati Hamid, 2018).

Menurut Mardikanto dan Poerwoko, tujuan pemberdayaan adalah hal-hal yang terdiri dari berbagai usaha perbaikan, yaitu:

1. Perbaikan pendidikan (*better education*), berarti pemberdayaan harus direncanakan sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan ini tidak hanya mencakup materi, teknik, waktu, dan lokasi, tetapi yang paling penting adalah bagaimana pendidikan non formal dapat menumbuhkan semangat dan keinginan untuk belajar tanpa batas.
2. Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*), diharapkan bahwa aksesibilitas akan meningkat seiring dengan keinginan untuk belajar sepanjang hayat. Ini terutama berlaku untuk aksesibilitas terhadap sumber inovasi dan informasi, sumber dana dan dana, penyedia barang, peralatan, dan organisasi promosi.
3. Perbaikan tindakan (*better action*), berarti bahwa peningkatan pendidikan dan peningkatan akses ke berbagai sumber daya (SDM, SDA, dan sumber

daya buatan lainnya) diharapkan akan menghasilkan tindakan yang lebih baik.

4. Perbaikan kelembagaan (*better institutional*) berarti bahwa kegiatan dan tindakan yang lebih baik diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan masyarakat, terutama dengan membangun jaringan kemitraan-usaha yang akan memungkinkan peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya.
5. Perbaikan usaha (*better business*) diharapkan dapat meningkatkan bisnis dan usaha melalui peningkatan pendidikan (semangat belajar), aksesibilitas, kegiatan, dan kelembagaan.
6. Perbaikan pendapatan (*better income*), juga disebut sebagai peningkatan pendapatan dimaksudkan bahwa perbaikan bisnis yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan pendapatannya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
7. Perbaikan Lingkungan (*better environmental*), dengan kata lain, perbaikan pendapatan dapat memperbaiki lingkungan secara fisik dan sosial karena kemiskinan atau keterbatasan pendapatan adalah penyebab utama kerusakan lingkungan.
8. Perbaikan Kehidupan (*better living*), ini berarti bahwa kehidupan setiap keluarga dan masyarakat diharapkan lebih baik dengan tingkat pendapatan yang memadai dan lingkungan yang sehat.
9. Perbaikan Masyarakat (*better community*), dengan kata lain, kondisi hidup yang lebih baik, didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih

baik, diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang juga lebih baik (Siboro, 2023).

Sumodiningrat mengatakan bahwa Jika dilihat dari proses operasionalisasinya, maka ide dari pemberdayaan memiliki beberapa kecenderungan yang diantaranya adalah:

1. Kecenderungan primer, yaitu proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat atau individu untuk membuat mereka lebih berdaya. Proses ini dapat dikombinasikan dengan upaya untuk membangun aset material untuk membantu mereka berkembang menjadi lebih mandiri melalui organisasi.
2. Kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan proses mendorong, mendorong, atau mendorong individu untuk memiliki kemampuan atau keberanian untuk membuat pilihan hidup mereka sendiri melalui proses percakapan. Meskipun kedua kecenderungan tersebut tampaknya berseberangan pada titik ekstrim, sering kali diperlukan untuk menghasilkan kecenderungan primer terlebih dahulu. (Hadi, 2015), (Lomboan et al., 2021).

Hak ekonomi, sosial, dan budaya yang diaktualisasikan dalam partisipasi penyelenggaraan termasuk hak peran masyarakat. Setiap individu dan kelompok masyarakat yang menikmati keadilan sosial memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan. Jenis-Jenis program pemberdayaan yang dimaksud adalah:

1. Pemberdayaan lingkungan,
2. Pemberdayaan kesehatan,

3. Pemberdayaan hukum,
4. Pemberdayaan sosial budaya,
5. Pemberdayaan politik, dan
6. Pemberdayaan spiritual (Rukminto, 2018).

Pemberdayaan lingkungan adalah proses yang melibatkan komunitas untuk berpartisipasi secara aktif dalam melestarikan, melindungi, dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, sambil meningkatkan kualitas hidup mereka. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberi mereka kemampuan untuk terlibat langsung dalam menjaga lingkungan sekitar mereka dan membuat keputusan yang akan membantu generasi mendatang menikmati kelestarian alam dan kesejahteraan.

Pemberdayaan kesehatan memungkinkan individu, keluarga, dan komunitas untuk memiliki kontrol lebih besar atas kesehatan mereka sendiri dikenal sebagai pemberdayaan kesehatan. Tujuannya adalah agar masyarakat memiliki kemampuan untuk membuat keputusan kesehatan yang tepat, memiliki akses ke layanan kesehatan berkualitas tinggi, dan aktif berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Metode ini berpusat pada penyediaan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya agar masyarakat dapat mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial, fisik, dan mental mereka.

Pemberdayaan hukum adalah dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman, akses, dan keterampilan seseorang dan masyarakat sehingga mereka dapat memahami, melindungi, dan memperjuangkan hak-hak mereka.

Pemberdayaan hukum juga meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem hukum yang adil dan transparan.

Pemberdayaan sosial budaya adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dan komunitas untuk mempertahankan, mengembangkan, dan memanfaatkan nilai-nilai, tradisi, dan identitas budaya mereka sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Tujuan pemberdayaan ini adalah untuk melestarikan kekayaan budaya lokal, menumbuhkan rasa kebanggaan akan identitas, dan memperkuat kohesi sosial di tengah perubahan sosial yang cepat. Selain itu, pemberdayaan sosial budaya juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran identitas budaya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga menyelesaikan konflik di masyarakat.

Pemberdayaan politik memungkinkan individu dan komunitas untuk memahami, berpartisipasi, dan mempengaruhi sistem politik dengan lebih baik. Pemberdayaan politik dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, memperjuangkan hak-hak politik, dan memastikan bahwa suara masyarakat terdengar dan diperhitungkan dalam proses pembuatan kebijakan. Akibatnya, pemberdayaan politik menghasilkan tata kelola yang lebih adil, demokratis, dan inklusif.

Pemberdayaan spiritual adalah proses yang memungkinkan seseorang atau komunitas untuk menjadi lebih sadar diri dan memahami nilai-nilai kehidupan mereka, serta hubungan mereka dengan orang lain, orang lain, dan lingkungan mereka. Tujuan pemberdayaan spiritual adalah untuk membantu orang menemukan

makna dalam hidup mereka, meningkatkan kesehatan mental dan emosional mereka, dan menumbuhkan rasa keterhubungan dengan dunia lebih besar.

Wilson menyampaikan ada empat tahapan dalam proses pelaksanaan pemberdayaan yakni:

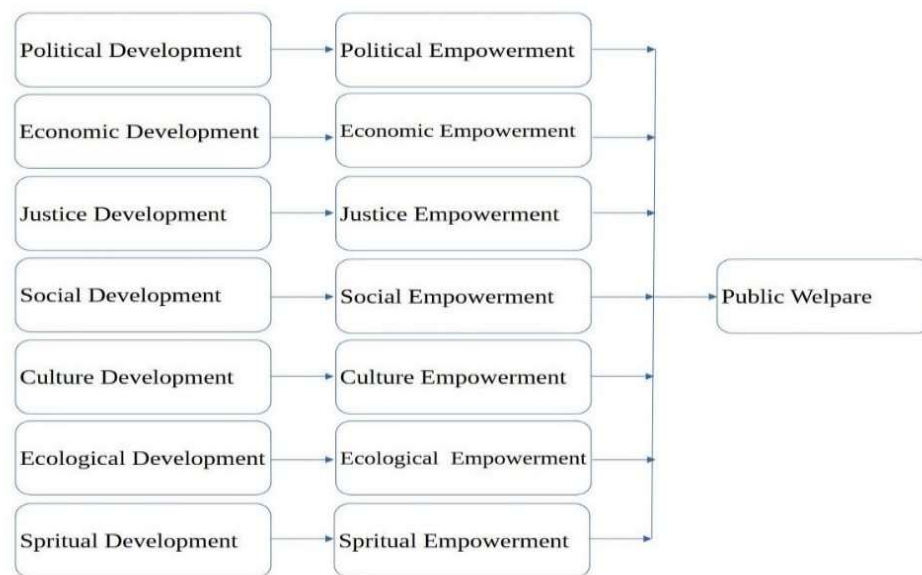
1. *Awakening* (penyadaran), adalah fase di mana masyarakat menyadari sikap, kemampuan, dan keterampilan mereka serta rencana dan harapan untuk meningkatkan, mengoptimalkan, dan menghasilkan hasil yang lebih baik.
2. *Understanding* (pemahaman), adalah Masyarakat memperoleh pemahaman dan pemahaman baru tentang diri mereka sendiri, tujuan mereka, dan keadaan umum lainnya. Selama tahap pemahaman, mereka juga belajar untuk menghargai pemberdayaan dan apa yang dibutuhkan komunitas dari mereka.
3. *Harnessing* (pemanfaatan) adalah merupakan fase pemberdayaan di mana mereka memilih untuk menggunakannya untuk kebaikan komunitasnya.
4. *Using* (menggunakan keterampilan dan kemampuan) yang merupakan pelaksanaan pemberdayaan sebahagian dari pelaksanaan kehidupan sehari-hari (Ilham & Hardi, 2020).

Menurut Aswas (dalam Hamid, 2018) dalam kegiatan pemberdayaan harus memegang beberapa prinsip yang menjadi acuan dalam pelaksanaannya sehingga kegiatan dapat berjalan dengan benar dan tepat. Adapun prinsip tersebut adalah:

1. Pemberdayaan dilaksanakan dengan penuh demokratis, yaitu pemberdayaan dilakukan dengan penuh keikhlasan, tidak ada unsur-unsur paksaan.
2. Kebutuhan, masalah, dan potensi yang dimiliki kelompok sasaran, karena pada setiap masyarakat mempunyai masalah, kebutuhan, dan potensi yang masing-masing berbeda.
3. Terfokus kepada Masyarakat, karena sasaran utama pemberdayaan adalah masyarakat, sehingga harus diposisikan sebagai subjek/pelaku dalam kegiatan pemberdayaan.
4. Menumbuhkan Kearifan lokal, dan nilai-nilai budaya, seperti jiwa gotong royong, saling menghormati. Hal ini menjadi modal sosial dalam pembangunan.
5. Dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.
6. Memperhatikan lagi keragaman karakter, budaya dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sudah mengakar atau berlangsung lama atau secara turun temurun.
7. Memperhatikan seluruh aspek sosial, ekonomi di dalam kehidupan masyarakat.
8. Tidak ada unsur diskriminasi, terutama kepada Perempuan dan kaum yang rentan.
9. Pengambilan Keputusan secara partisipatif. Selalu menerapkan proses pengambilan keputusan secara partisipatif, seperti penetapan waktu, materi, metode kegiatan dan lain-lainnya dalam pemberdayaan.

10. Partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk fisik maupun non fisik.

Pemberdayaan dapat bervariasi berdasarkan pada tujuan Pembangunan, berbagai jenis pemberdayaan dapat dikombinasikan dan saling melengkapi satu sama lain untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.3
Pengembangan Masyarakat, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat
Sumber: Isbandi (dalam Hani et al., 2021)

Chambers (Ridho & Kurniawati, 2024), (Muhajarah et al., 2023) Paradigma baru pembangunan yang dikenal sebagai *post-developmentalism* merupakan inti dari gagasan pembangunan yang mencakup berbagai aspek, yang bersifat:

1. *People centred,*
2. *Partici-patory,*
3. *Empowering, and*

4. *Sustainable*.

People-centred berarti berfokus pada kebutuhan, keinginan, dan kepentingan individu atau komunitas manusia dalam merancang kebijakan, layanan, atau produk. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, *people-centred* berarti bahwa proses pemberdayaan berpusat pada kebutuhan, aspirasi, dan potensi masyarakat itu sendiri. Pendekatan ini bertujuan untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam menentukan solusi bagi masalah mereka, sehingga masyarakat bukan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi aktor utama dalam perubahan sosial.

Participatory dalam konteks pemberdayaan merujuk pada pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif dan langsung dari masyarakat dalam setiap tahap proses pengambilan keputusan, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi program yang bertujuan untuk memberdayakan mereka. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki suara, keterlibatan, dan pengaruh dalam menentukan solusi atas masalah yang mereka hadapi.

Empowering dalam konteks pemberdayaan masyarakat berarti memberikan masyarakat kekuatan, kemampuan, dan sumber daya yang diperlukan untuk mengambil kendali atas kehidupan mereka sendiri. Ini melibatkan peningkatan kapasitas individu dan komunitas untuk membuat keputusan, mengakses peluang, dan memecahkan masalah secara mandiri, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam mengubah kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan mereka.

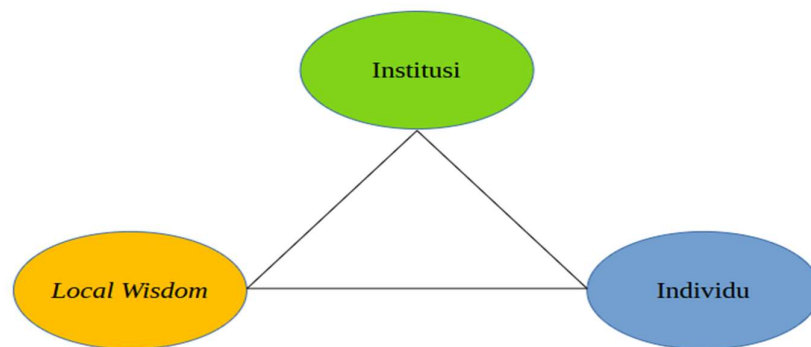
Sustainable dalam konteks pemberdayaan masyarakat berarti menciptakan proses pemberdayaan yang berkelanjutan dan mampu bertahan dalam jangka

panjang, baik dari segi dampak maupun keberlanjutannya. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga pada pengembangan kapasitas dan sumber daya yang memungkinkan masyarakat untuk terus berkembang dan mandiri tanpa ketergantungan berlebihan pada bantuan eksternal.

Pelaksanaan pemberdayaan diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara individual maupun keluarga. Dalam hal ini pemberdayaan mestinya melakukan pendekatan pemberdayaan melalui kelompok bukan individu, sehingga kesejahteraan dapat diterima secara kolektif. Menurut Chalid (Alfriza et al., 2018), Pemberdayaan masyarakat erat kaitannya dengan tiga hal pokok, yaitu:

1. Kearifan lokal (*local wisdom*),
2. Institusi dan
3. Individu.

Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah:



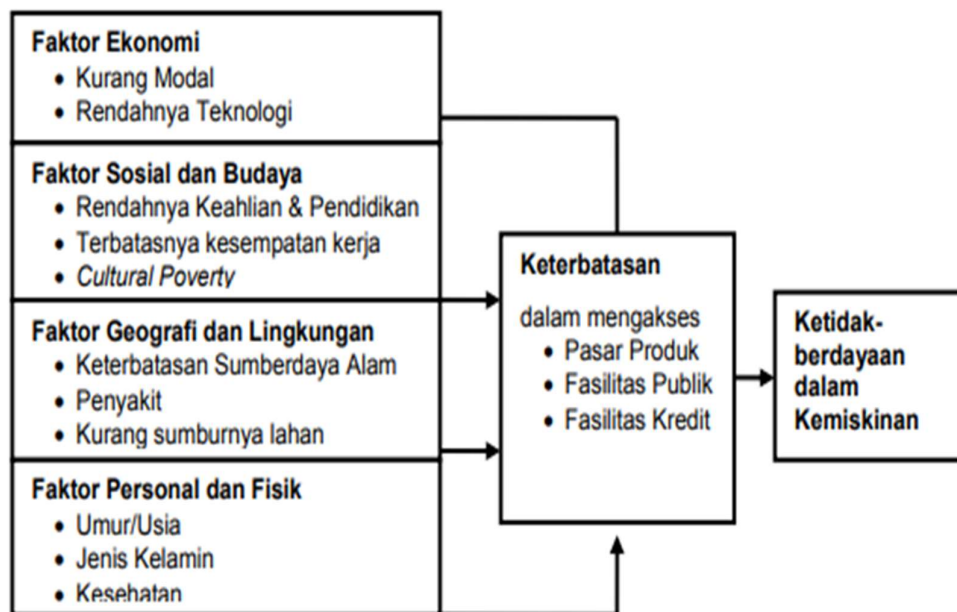
Gambar 2. 4
Skema Pemberdayaan Masyarakat
Sumber: Chalid.

Ketiga komponen pemberdayaan tersebut saling mendukung dan melengkapi. Apabila salah satu dari ketiganya mengalami ketimpangan atau tidak berjalan dengan seksama, maka pemberdayaan tidak akan terealisasi.

Situasi dan Kondisi ke tidak berdayaan masyarakat dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Anne Both & Firdausy (2016) menyatakan bahwa ke tidak berdayaan masyarakat terhadap kemiskinan disebabkan oleh keterbatasan mereka dalam mengakses pasar barang, layanan publik, dan kredit. Selanjutnya Both menyatakan keterbatasan ini dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu:

1. Faktor ekonomi,
2. Faktor sosial budaya,
3. Faktor geografi dan lingkungan dan
4. Faktor personal dan fisik (Rahima, 2021).

Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 2.5
Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tidak berdayaan Masyarakat Dalam Kemiskinan

Sumber: Anne Both & Firdausy (2016)

Faktor ekonomi memegang peranan penting dalam pemberdayaan individu dan masyarakat. Pemberdayaan ekonomi bertujuan untuk memberikan akses, kesempatan, dan kapasitas kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya secara mandiri dan berkelanjutan. Faktor sosial budaya sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat karena mereka berperan dalam membentuk perilaku, nilai, dan norma yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Dengan memperhatikan faktor sosial budaya ini, program pemberdayaan dapat lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan serta konteks spesifik masyarakat, sehingga menghasilkan dampak yang lebih positif dan berkelanjutan.

Faktor geografi dan lingkungan memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat, terutama dalam hal akses terhadap sumber daya, keberlanjutan hidup, dan kerentanan terhadap bencana alam. Dengan memperhatikan faktor-faktor geografi dan lingkungan, program pemberdayaan dapat lebih relevan, berkelanjutan, dan disesuaikan dengan kondisi spesifik setiap wilayah. Ini akan memastikan bahwa pemberdayaan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan jangka pendek, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan jangka panjang masyarakat.

Faktor personal dan fisik juga memainkan peran penting dalam pemberdayaan individu dan masyarakat, karena keduanya mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memanfaatkan peluang yang ada serta menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan menangani faktor-faktor personal dan fisik ini, proses pemberdayaan dapat lebih efektif dan menyeluruh. Hal ini memungkinkan individu untuk mengatasi hambatan fisik dan

psikologis serta memaksimalkan potensi yang mereka miliki untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan yang lebih baik.

George C. Homans mengungkapkan dasar teori pemberdayaan yang terdiri dari:

1. Teori pertukaran, merupakan adanya pengalihan sumber daya dari satu pihak ke pihak lain.
2. Teori pilihan rasional, yaitu mendorong untuk melakukan tindakan tertentu yang menghindarkan tindakan yang lain yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu
3. Teori partisipasi, yaitu turut serta dalam berbagai kegiatan lebih-lebih yang berhubungan langsung dengan pemberdayaan secara emansipatif (Sastrawati, 2019); (Pujileksono, 2022).

Ndraha (A. H. Rahmawati et al., 2016) menjelaskan bahwa diperlukan berbagai tindakan dalam program pemberdayaan yaitu :

1. Pemberdayaan Politik
2. Pemberdayaan Ekonomi
3. Pemberdayaan Sosial-Budaya
4. Pemberdayaan Lingkungan

Jim ife (Hanif & Mutakin, 2019) Pemberdayaan yang diadaptasi dari istilah-istilah pemberdayaan yang berkembang di Eropa dari abad pertengahan terus berkembang hingga akhir 70-an, 80-an, dan awal 90-an. Konsep pemberdayaan kemudian mempengaruhi teori-teori yang berkembang kemudian. Mengenai makna

gagasan pemberdayaan masyarakat, Jim Ife menyatakan bahwa Pemberdayaan berarti:

1. Menyediakan sumber daya,
2. Kesempatan,
3. Pengetahuan,
4. Keterampilan kepada masyarakat

Menyediakan sumber daya merupakan salah satu aspek penting dalam pemberdayaan masyarakat yang mana salah satu bagian dari hal ini adalah penyediaan sumber daya yang memadai, baik itu berupa sumber daya manusia, finansial, maupun material maupun sumber daya alam (Hazmanan Khair, 2019). Kesempatan dalam pemberdayaan merujuk pada berbagai peluang yang tersedia bagi individu atau kelompok untuk meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan kemandirian mereka (Amalia & Syawie, 2016). Pengetahuan dalam pemberdayaan adalah salah satu aspek penting yang berfungsi sebagai dasar untuk meningkatkan kapasitas individu dan komunitas dalam mengambil tindakan yang berdaya dan mandiri. Pemberdayaan berbasis pengetahuan menekankan pentingnya pendidikan, informasi, dan pemahaman yang dapat mendorong perubahan positif dalam Masyarakat (Haslinah et al., 2023). Keterampilan kepada masyarakat adalah proses pemberian kemampuan praktis dan pengetahuan yang diperlukan bagi individu atau kelompok dalam suatu komunitas untuk meningkatkan kualitas hidup mereka (Ibrahim et al., 2023).

Keempat aspek pemberdayaan di atas tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menentukan masa depan mereka, dan untuk

berpartisipasi dalam dan mempengaruhi kehidupan komunitas mereka agar terbebas dari keterpurukan, keterbelakangan dan kemiskinan.

Mengenai pemberdayaan, Najiyati et al mengatakan bahwa terdapat 4 (empat) prinsip yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Prinsip kesetaraan,
2. Partisipasi,
3. Keswadayaan/kemandirian dan
4. Berkelanjutan. (Handono et al., 2020)

Prijono dan Pranarka pendekatan pemberdayaan masyarakat dimulai dengan:

1. Membangun sumber daya manusia,
2. Kelembagaan kelompok,
3. Perusahaan produktif,
4. Memberikan informasi yang sesuai (Arwana & Wijaya, 2022).

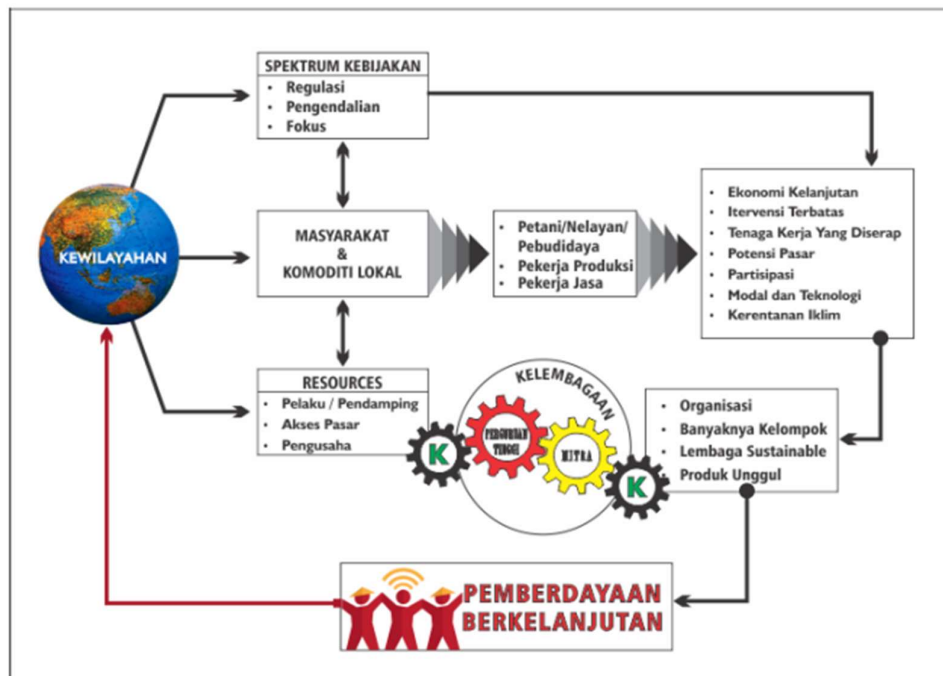
Ginjar Kartasmita (Mulyawan, 2016) menyebutkan tiga aspek pokok yang perlu dilakukan dalam proses pemberdayaan masyarakat yang di antaranya adalah:

1. Menciptakan suasana yang memungkinkan berkembangnya potensi atau daya yang di miliki oleh individu atau masyarakat (*enabling*),
2. Memperkuat potensi atau daya yang di miliki oleh individu atau masyarakat (*empowering*), dan
3. Melindungi masyarakat terutama keberpihakan kepada masyarakat lemah.

Model pemberdayaan masyarakat baik yang diformulasikan oleh pemerintah maupun yang dikembangkan dan diusulkan oleh kalangan spesialis di bidang pemberdayaan Masyarakat yang tujuannya adalah untuk mengangkat harkat, martabat dan perekonomian masyarakat, pada umumnya meletakkan variabel-variabel kunci sebagai berikut:

1. Regulasi (pemerintah)
2. Kelembagaan
3. Modal dan teknologi
4. Akses pasar
5. Partisipasi masyarakat
6. Sumber daya manusia; dan
7. Infrastruktur (Kamuli et al., 2019).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah:



Gambar 2. 6
Model Formulasi Pemberdayaan Masyarakat
Sumber: Kamuli et al., 2019.

Terdapat sejumlah indikator keberhasilan yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, dan ini termasuk:

1. Berkurangnya jumlah masyarakat miskin.
2. Usaha peningkatan pendapat yang dilakukan penduduk miskin semakin berkembang dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
3. Kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya semakin meningkat.
4. Kemandirian kelompok semakin meningkat yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif dari anggota dan kelompok, makin kuatnya modal kelompok yang di peroleh, semakin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya hubungan interaksi sosial dengan kelompok lainnya (Sumodiningrat, 2002).

Kajian tentang pemberdayaan menyajikan banyak hal mengenai indikator pemberdayaan. Diantaranya adalah menyangkut derajat pemberdayaan menurut Soeharto (Hanan et al., 2023), yaitu:

1. *Power to*, tingginya tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah.
2. *Power within*, tingginya tingkat kapasitas untuk memperoleh akses dari dalam ataupun luar komunitas.
3. *Power over*, kemampuan dalam menghadapi hambatan, tantangan dan rintangan.
4. *Power with*, kemampuan kerja sama antara kelompok dan solidaritas yang tinggi.

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Secara umum menurut Hutomo (Octaviana, Rica & Warsono, 2020) dikelompokkan dalam beberapa kegiatan yaitu:

1. Bantuan permodalan;
2. Bantuan pembangunan sarana dan prasarana;
3. Bantuan pendampingan kepada masyarakat;
4. Penguatan organisasi kelembagaan;
5. Memperkuat kemitraan.

Dalam pemberdayaan masyarakat, terdapat beberapa kendala dalam upaya pelaksanaannya. Menurut Watson (A. H. Rahmawati et al., 2016) yaitu:

1. Kendala internal yaitu kendala yang berasal dari kepribadian individu atau kelompok, yang terdiri dari:
 - a. *Homeostatis* (kestabilan)
 - b. *Habit* (kebiasaan)
 - c. *Primacy* (hal yang utama)
 - d. Ingatan dan persepsi
 - e. *Dependence* (ketergantungan)
 - f. Super ego
 - g. Tidak percaya diri
 - h. Tidak aman dan regresi
2. Kendala eksternal yaitu kendala yang berasal dari sistem sosial:
 - a. Konsensus tentang aturan tertentu
 - b. Kesatuan paduan sistem dan budaya

- c. Kelompok kepentingan
- d. Hal yang bersifat sakral
- e. Penolakan terhadap pengaruh dan orang luar.

Pembedayaan masyarakat akan terwujud apabila masyarakat selaku objek pemberdayaan memiliki sikap sadar akan kekurangan yang mereka miliki. Oleh sebab itu, masyarakat dalam bentuk komunitasnya harus memiliki kesadaran yang tergantung kepada perkembangan kesadaran komunitasnya. Menurut Najiyeti. (E. S. Nasution, 2024) Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka kesadaran komunitas dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.7
Kesadaran komunitas dalam pemberdayaan
Sumber: Naziyeti

Fokus pemberdayaan disesuaikan dengan tingkat perkembangan perilaku dan kesadaran individu tersebut. Pemberdayaan komunitas apatis dan ketergantungan berfokus pada perubahan perilaku untuk mencapai tahap kesadaran

praktis dan kritis. Kelompok yang menerima bantuan material langsung akan hanya menggunakannya secara konsumtif dan pada akhirnya akan menjadi lebih bergantung pada orang lain.

Dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat berupaya meningkatkan kemampuan masyarakat dan kelompok untuk mandiri, terlibat aktif, dan membuat pilihan-pilihan yang akan meningkatkan taraf hidup mereka. Strategi yang diperhitungkan untuk mendorong perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam jangka panjang adalah pemberdayaan masyarakat. Masyarakat yang lebih mandiri, kompetitif, dan mendukung pembangunan yang inklusif dan adil akan terwujud jika setiap individu diberdayakan.

Pendekatan strategis yang bermanfaat bagi banyak aspek lingkungan dan kehidupan manusia adalah memberdayakan masyarakat sekitar hutan. Strategi utama untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan ekologi dan komersial adalah pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan. Program ini dapat mendorong pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan melestarikan kelestarian lingkungan dengan memberdayakan masyarakat lokal dan memanfaatkan potensi hutan secara berkelanjutan.

Salah satu kebijakan dari pemerintah adalah melakukan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan, maka pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan regulasi yang berkaitan dengan program tanaman kehidupan yang mana program ini mempunyai tujuan untuk melestarikan kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Dengan melakukan pendekatan yang komprehensif, program tanaman

kehidupan membantu masyarakat lokal membangun ekonomi berbasis hutan yang sukses sekaligus menjaga kelestarian ekosistem hutan.

2.9 Modal Sosial

Konsep Modal Sosial

Menurut Gold, secara etimologis, modal sosial memiliki arti modal yang dimiliki masyarakat dalam pelaksanaan suatu pemberdayaan masyarakat (Andreas & Savitri, 2016). Hal ini mengandung makna bahwa pemberdayaan Masyarakat berkaitan erat dengan modal sosial karena tanpa modal yang dimiliki, maka pemberdayaan tidak akan berjalan dengan baik.

Menurut Fukuyama, modal sosial yang tumbuh dalam suatu komunitas dengan aturan bersama akan sangat membantu memperkuat entitas komunitas. Kemampuan untuk menghasilkan dan mengirimkan ide, pemikiran, dan barang lain adalah salah satu jenis modal sosial. Modal sosial yang ada dalam masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat bahkan dapat mengurangi kemungkinan konflik. Bangsa-bangsa yang memiliki modal sosial yang tinggi akan cenderung lebih efisien dan efektif menjalankan berbagai kebijakan untuk menyejahterakan dan memajukan kehidupan rakyatnya, dan begitu juga sebaliknya, masyarakat yang memiliki modal sosial yang tinggi akan lebih mudah menyelesaikan masalah. Hubungan antar masyarakat yang lebih kuat dapat menghasilkan lebih banyak hasil daripada yang diharapkan ketika modal sosial meningkat. (Kholifa, 2016).

Menurut Putnam modal sosial menggambarkan suatu organisasi sosial dengan kepercayaan, norma dan jaringannya yang memungkinkan kerja sama dan

kerja sama yang menguntungkan bagi semua anggota organisasi. Jaringan dan norma saling berhubungan secara empiris dan memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Modal sosial yang lebih besar akan menghasilkan hubungan masyarakat yang lebih produktif dan rasa percaya satu sama lain. Dalam berbagai cara, modal sosial yang lebih besar akan berdampak pada peningkatan partisipasi masyarakat sipil. (Hudayana, 2017).

Modal sosial biasanya didefinisikan sebagai jaringan yang mendorong pengembangan sumber daya dan manfaat yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas individu, masyarakat, dan organisasi. Modal sosial berasal dari interaksi antara orang-orang dalam suatu komunitas dan dianggap sebagai syarat penting bagi hubungan masyarakat dan berjalannya suatu organisasi. Maka, modal sosial sering digambarkan sebagai “lem” yang merekatkan masyarakat (Muntasib, 2017).

Modal sosial juga dikenal dengan aset sosial di mana aset adalah hal yang tidak dapat dilihat yang berasal dari kepribadian setiap orang. Aset-aset ini berasal dari persahabatan, kasih sayang, empati, dan hubungan antar individu yang tergabung dalam satu jaringan bersama dengan nilai dan standar yang memungkinkan kerja sama. Modal sosial mencakup norma, sanksi, kewajiban, dan harapan (Syofyan, 2019).

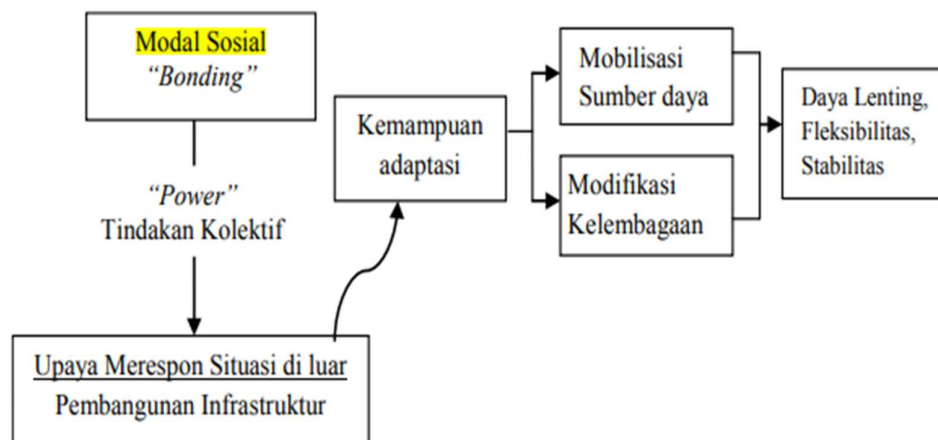
Menurut Syahyuti, modal sosial terdiri dari ratusan hingga ribuan interaksi sehari-hari antara individu. Fenomena modal sosial berasal dari orang-orang yang membentuk jaringan dan hubungan sosial berdasarkan prinsip "*trust, reciprocity, and norm of action*". Modal sosial yang kuat muncul dari tradisi sejarah dan

perilaku individu atau kelompok, yang dapat mengatur kepentingan individu dan kelompok. Norma-norma ini secara informal dapat mengatur hubungan antar individu dan kelompok, menumbuhkan kepercayaan. Menurut standar ekonomi yang didasarkan pada kepercayaan, suatu kegiatan ekonomi dapat berlangsung secara ekonomis, produktif, dan efisien (Nyoman Yuliarmi et al., 2017).

Uphoff menyatakan bahwa komponen modal sosial terbagi menjadi dua kategori yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain yaitu: struktural (peranan, aturan, jaringan dan kerja sama) dan kognitif (kepercayaan, keyakinan, kedermawanan dan solidaritas). Kategori struktural tersebut berkaitan dengan berbagai jenis organisasi sosial, sedangkan kategori kognitif berasal dari proses mental yang didukung oleh budaya dan ideologi. Bentuk yang satu mempengaruhi bentuk yang lain, dan keduanya mempengaruhi perilaku seseorang hingga mekanisme pembentukan harapan (Anen, 2016).

Konsep modal sosial menarik perhatian para praktisi pembangunan dan akademisi. Paradigma pembangunan inklusif berkelanjutan menggunakan modal sosial sebagai kerangka teoritis yang bermanfaat. Mengingat paradigma pembangunan yang diberlakukan ini lebih berfokus pada *bottom-up* dari pada *top-down*, posisi modal sosial menjadi penting untuk diperhatikan. Dalam paradigma pembangunan berkelanjutan, modal sosial adalah dimensi sosial, yang menggabungkan tiga dimensi: sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selain itu, posisi modal sosial membantu dalam dimensi politik karena meningkatkan partisipasi masyarakat, aksesibilitas, dan kebebasan, yang merupakan pilar paradigma pembangunan inklusif berkelanjutan (Fathy, 2019).

Modal sosial mengacu pada elemen-elemen yang membentuk organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma-norma, dan jaringan sosial yang dapat membantu orang bekerja secara bersama-sama. Modal sosial menekankan akan pentingnya masyarakat bersatu untuk meningkatkan kualitas hidup bersama dan melakukan perubahan dan penyesuaian yang lebih baik. Burt menjelaskan modal sosial sebagai kemampuan masyarakat untuk berhubungan satu sama lain. Ini adalah kekuatan penting untuk semua aspek eksistensi sosial, termasuk ekonomi (Kusumastuti, 2016). Kemudian lebih lanjut diasumsikan bahwa modal sosial Kekuatan yang dimiliki masyarakat dapat digunakan untuk mendorong tindakan kolektif. Tindakan kolektif yang hadir membantu mengembangkan kemampuan adaptasi ketika mereka menghadapi situasi yang berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah:



Gambar 2.8
Modal Sosial Sebagai Mekanisme Kemampuan Adaptasi Masyarakat
Sumber: Kusumastuti (2016)

Definisi modal sosial (*social capital*) menurut Coleman pada dasarnya adalah kemampuan di dalam berbagai kelompok dan organisasi (Marfai et al.,

2015). Menurut Greve et al, Kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain, baik di dalam maupun di luar organisasi, untuk mendapatkan saran dan pemecahan masalah disebut modal sosial, di mana modal sosial berhubungan dengan produktivitas dengan membantu karyawan dalam pertukaran pengetahuan dan mendorong gagasan inovatif yang meningkatkan produktivitas kinerja mereka dalam memajukan sebuah organisasi agar dapat terus eksis (Delmas & Pekovic, 2018).

Putnam mengatakan bahwa modal sosial adalah bagian dari kehidupan sosial, yang terdiri dari jaringan, norma, dan kepercayaan yang mendorong orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan lebih baik untuk mencapai tujuan bersama (Marfai et al., 2015). Robert M.Z. Lawang juga menyatakan bahwa Modal sosial adalah investasi sosial yang terdiri dari sumber daya sosial seperti jaringan, kepercayaan, nilai, dan norma yang dibuat oleh individu atau kelompok dengan mengacu pada struktur sosial yang mereka percaya dapat membantu mereka mencapai tujuan mereka lebih baik daripada sumber daya lain (Syahli & Sekarningrum, 2017).

Modal sosial biasanya didefinisikan sebagai hubungan, institusi, sikap, dan nilai yang memudahkan interaksi individu dan kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan ekonomi dan masyarakat itu sendiri. Modal sosial menurut Bourdie dan Wacquant adalah jumlah sumber daya, baik aktual maupun maya, yang dikumpulkan pada seorang individu atau kelompok karena memiliki jaringan tahan lama yang terdiri dari hubungan timbal balik pengenalan dan pengakuan yang sedikit terestrukturisasi (Khoiri, 2017).

Modal sosial, menurut Winarni, adalah fitur organisasi atau organisasi sosial, termasuk masyarakatnya, yang mengorganisasikan dan memfasilitasi kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Poli menyatakan bahwa modal sosial memiliki kemampuan untuk menyatukan masyarakat dalam komunitas yang beradab. Menurut Kasih, modal sosial bukan hanya norma yang muncul secara tidak resmi, tetapi juga merupakan dasar untuk kerja sama individu dan kelompok. Selain, menurut Hasbullah modal sosial lebih menekankan potensi kelompok dan hubungan antar individu dalam dan antar kelompok (Wulandari, 2019).

Menurut (Prayitno, 2022) Modal sosial memiliki manfaat yang dapat digunakan oleh kelompok masyarakat yang tinggal di suatu wilayah. Beberapa manfaat yang dapat diterima oleh kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat dan meningkatkan solidaritas,
2. Memudahkan mobilitas sumber daya kelompok,
3. Membuat pencapaian bersama lebih mudah,
4. Membentuk perilaku kebersamaan dan organisasi kelompok, dan
5. Memberi anggota kelompok kemudahan untuk mendapatkan informasi.

Portes mengatakan bahwa modal sosial adalah kemampuan para aktor untuk menjamin manfaat dengan bertumpu pada keanggotaan dalam jejaring sosial dan struktur sosial lainnya. Lang & Hornburg mengatakan bahwa modal sosial biasanya merujuk kepada tersedianya rasa kepercayaan sosial, norma, dan jejaring yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan bersama. Coleman menganggap modal sosial sebagai semua hal yang dirancang

atau dimaksudkan untuk memudahkan tindakan seseorang dalam struktur sosialnya (Fathy, 2019).

Keragaman modal sosial dari beberapa pendapat ahli dapat dirangkum sebagai berikut:

Aset	Menurut Bourdieu, Coleman, Putnam, modal sosial adalah aset individual aktor, kemudian berkembang menjadi aset kelompok. Menurut Fukuyama, modal sosial adalah aset kelompok yang dimanfaatkan oleh individu aktor
Kedekatan Hubungan	Menurut Bourdieu, Coleman dan Putnam, kedekatan hubungan sangat vital dalam mengidentifikasi modal sosial. Kedekatan hubungan melembagakan <i>trust</i> norma dan hubungan saling menguntungkan. Mereka berfokus kepada <i>bonding social capital</i> . Menurut Fukuyama, kedekatan hubungan tidak terlalu dominan karena bisa dihubungkan oleh aktor-aktor tertentu (sebagai jembatan sekaligus pengarah) dan selanjutnya melembagakan <i>linking social capital</i> .
Fungsi	Menurut Bourdieu, Coleman, Putnam, modal sosial berfungsi sebagai agen perubahan sosial dan dapat memberi dukungan individual aktor atau kelompok mencapai berbagai tujuan dan memenuhi kepentingan.

Gambar 2.9
Pemetaan Modal Sosial
Sumber: (Su. Usman, 2018)

Indikator Modal Sosial

Menurut Soeharto ada beberapa indikator kunci yang dapat dijadikan ukuran modal sosial diantaranya adalah:

1. Perasaan Identitas
2. Perasaan Memiliki
3. Sistem Kepercayaan dan Ideologi
4. Nilai dan Tujuan
5. Ketakutan
6. Sikap Terhadap Anggota Lain di Masyarakat
7. Harapan yang Ingin Dicapai pada Masa Depan

8. Tingkat Kepercayaan Kepada Pihak Lain (Ambarita & Henry, 2015).

Menurut Nasution, Modal sosial dinyatakan sebagai modal yang terdiri dari beberapa hal yaitu:

1. Rasa percaya (rasa percaya),
2. Kepatuhan terhadap norma yang berlaku (norma),
3. Kemampuan membangun jejaring sosial (jejaring sosial),
4. Partisipasi dalam kelompok sosial, serta
5. Partisipasi dalam kepentingan umum (gotong royong) (A. Nasution, 2017).

Komponen yang terikat dalam struktur sosial komunitas dapat digunakan untuk menentukan kekuatan modal sosial. Ada beberapa komponen modal sosial, salah satunya adalah:

1. Kepercayaan (*trust*),
2. Nilai dan Norma timbal balik,
3. Institusi dan Asosiasi,
4. Hubungan timbal balik, serta
5. Jaringan (Pratiwi, et.al, 2017).

Teori modal sosial dikembangkan oleh Cohen dan Prusak di mana setiap hubungan yang terjadi diikat oleh suatu:

1. Kepercayaan (*trust*)
2. Saling Pengertian (*mutual understanding*)
3. Kepercayaan akan pentingnya nilai-nilai Bersama (*shared value*) (Marfai et al., 2015).

Menurut Putnam bahwa modal sosial terdiri dari tiga yang diantaranya adalah:

1. *Trust* (kepercayaan)
2. *Norm* (norma)
3. *Networking* (jaringan) (Marfai et al., 2015); (Darmawan et al., 2023); (Suwarno et al., 2023).

Trus (Kepercayaan)

Kepercayaan adalah salah satu elemen utama dalam konsep modal sosial, karena kepercayaan adalah fondasi dari modal sosial karena memungkinkan orang untuk merasa nyaman dan yakin saat berinteraksi dengan orang lain. Tanpa kepercayaan, kerja sama sosial sulit untuk terjadi atau bertahan dalam jangka panjang. Fukuyama menggambarkan modal sosial sebagai kemampuan yang dihasilkan dari adanya kepercayaan dari dalam sebuah komunitas. Lebih lanjut Fukuyama menjelaskan bahwa kepercayaan adalah harapan yang muncul di dalam komunitas yang berperilaku jujur dan bekerja sama secara rutin, yang didasarkan kepada norma-norma bersama yang berlaku di antara anggota komunitas (Situmorang, 2017).

Kepercayaan menjadi hal yang penting untuk membangun hubungan sosial yang harmonis dan saling percaya antara individu atau kelompok. Kepercayaan akan terbentuk jika setiap anggota kelompok percaya bahwa sesama anggota akan berperilaku jujur dan dapat dipercaya. Keyakinan ini tidak hanya berlaku untuk individu, tetapi juga untuk kelompok tertentu atau masyarakat umum. Kepercayaan membantu membentuk modal sosial di dalam masyarakat. melalui kepercayaan

yang kuat, anggota masyarakat akan memiliki ketergantungan, solidaritas, dan kemampuan untuk bekerja sama, yang menghasilkan modal sosial penting bagi jaringan hubungan sosial yang saling membantu dan memungkinkan orang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. (Darmawan et al., 2023).

Kepercayaan merupakan keyakinan seseorang untuk menduduki posisi tertentu yang disebabkan karena ia memiliki kemampuan dan integritas untuk memenuhi harapan karena mereka jujur dan dapat memenuhi harapan. Menurut beberapa ahli lain, kepercayaan didefinisikan sebagai kesediaan satu pihak untuk mempercayai pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu yang penting bagi pihak yang mempercayainya (Haekal & Widjajanta, 2016).

Menurut Qianhong Fu, Kepercayaan memiliki tiga tingkatan yaitu:

1. Kekayaan individu, variabel personal, dan karakteristik individu disebut sebagai tingkat individu.
2. Berikutnya adalah tingkat hubungan sosial, di mana kepercayaan pada tingkat ini merupakan karakteristik kolektif untuk mencapai tujuan kelompok atau organisasi.
3. Tingkat sistem sosial, di mana nilai publik berkembang dan difasilitasi oleh sistem sosial (Masrukin, 2020).

Untuk membangun kepercayaan, individu dan kelompok harus mengambil risiko dan bertanggung jawab atas kebutuhan kelompok. Studi sebelumnya telah mendefinisikan beberapa aspek yang membentuk gagasan kepercayaan sebagai berikut:

1. Kejujuran yang tinggi

2. Kemampuan dan kemahiran teknis
3. Konsisten, yang berarti mampu menangani masalah dengan cara yang baik
4. Kesetiaan, yang berarti kemampuan untuk melindungi dan menyelamatkan harga diri seseorang
5. Keterbukaan terhadap berbagai ide dan data (Farida et al., 2016).

Suparyana et al., (2022) menegaskan bahwa salah satu komponen modal sosial adalah adanya kepercayaan yang terjalin antar setiap anggota kelompok, baik dengan satu sama lain, kelompok lain, dan tokoh masyarakat. Kepercayaan ini sangat penting agar masyarakat dapat bekerja sama dan menghasilkan kehidupan sosial yang harmonis. Ada sejumlah indikator modal kepercayaan, seperti kepercayaan pada orang-orang dari latar belakang atau etnis yang sama; kepercayaan pada orang-orang dari latar belakang atau etnis yang berbeda; kepercayaan pada pemerintah, kepolisian, tokoh masyarakat, agama, dan pihak luar (LSM atau organisasi non-pemerintah).

Para teoretikus sosial setuju bahwa kepercayaan (*trust*) adalah komponen penting dalam memperkuat dan mereproduksi kapital sosial karena memungkinkan hubungan dan tindakan yang saling menguntungkan. Menurut Giddens (Margi, 2016) membagi kepercayaan menjadi dua kategori yang saling terkait yaitu:

1. Kepercayaan terhadap sistem abstrak, kepercayaan (*trust*) yang berasal dari kinerja baik institusi publik atau pranata sosial; dan
2. Kepercayaan terhadap seseorang/personal, kepercayaan (*trust*) yang berasal dari hubungan intim dan terus-menerus antara orang. Kedua jenis kepercayaan ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.

Norm (Norma)

Norma masyarakat memiliki konsekuensi yang berbeda-beda dan dipahami dan dipatuhi oleh orang-orang (Romzy et al., 2019). Norma sosial sangat penting untuk mengontrol perilaku yang tumbuh dalam masyarakat. Norma adalah bagian dari peraturan yang ada dalam suatu hubungan dan tumbuh dan berkembang di masyarakat, berfungsi sebagai pedoman untuk menjaga keseimbangan dalam Masyarakat (Nababan, 2016).

Norma dianggap sebagai sumber daya sosial karena mereka adalah aturan umum yang menentukan bagaimana seseorang berperilaku. Individu menggunakan norma sebagai cara untuk berinteraksi dengan orang lain. Norma adalah kumpulan aturan yang diharapkan diikuti dan dipatuhi oleh anggota komunitas tertentu. Norma dalam modal sosial tidak dapat dilepaskan dari jaringan, kepercayaan, dan nilai (Syahli & Sekarningrum, 2017). Menurut Nopianti & Elvina, norma sosial adalah aturan atau standar sosial untuk berperilaku yang baik, dengan konsekuensi untuk menyimpang dari norma atau berperilaku tidak baik menurut ukuran lingkungan sosialnya (Suparyana et al., 2022).

Fukuyama menjelaskan bahwa dalam banyak kasus, kita dapat mengutamakan hal-hal yang penting saat bekerja sama dengan orang lain atau kelompok lain. Kita harus membuat standar negosiasi kooperatif yang mengatur berbagai interaksi sosial. Dalam hal ini, norma-norma membantu menjaga hubungan sosial antara masyarakat dan kelompok. Karena norma-norma ini mengatur hubungan individu dalam setiap kelompok, mereka akan memperkuat

hubungan mereka. Untuk menjaga tatanan sosial di masyarakat, norma penting untuk aktivitas dan gagasan kebersamaan (Ferdian et al., 2021).

Lebih lanjut Fukuyama menjelaskan bahwa norma terdiri dari empat jenis norma yang akan muncul, masing-masing dengan empat ciri unik yaitu:

1. Spontan-arasional (alamiah-teratur sendirinya),
2. Hierarkis-rasional (agama),
3. Spontan-rasional (tertata sukarela), dan
4. Hierarkis-rasional (politis) (Widiyarti & Pribowo, 2023).

Seokanto menjelaskan nilai yang jelas biasanya didefinisikan sebagai norma, dibuat untuk menjadi pedoman bagi semua orang untuk berperilaku sesuai dengan aturan masyarakat yang berlaku. Konsep norma yang mengacu pada pengaturan yang diberikan kepada seseorang tentang bagaimana berperilaku dalam lingkungan masyarakat. Terdapat empat istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan kekuatan yang mendasari norma-norma tersebut adalah:

1. Cara (*usage*),
2. Kebiasaan (*folkways*),
3. Tata kelakuan (*mores*), dan
4. Adat istiadat (*custom*) (Fadli, 2020).

Pleteu memberikan penjelasan bahwa norma, selain didefinisikan sebagai prinsip keadilan yang mendorong pelaku untuk berperilaku yang tidak mementingkan diri sendiri, juga dapat didefinisikan sebagai aturan yang menentukan perilaku dalam suatu kelompok individu. Norma akan sangat berperan dalam mengontrol bagaimana perilaku tumbuh dalam masyarakat sebagai aturan

terikat agar dapat mematuhi sesama masyarakat (V. Y. Utami, 2020). Nilai dan norma merupakan pra kondisi-pondasi yang membentuk keyakinan. Konvensi informal ini tidak akan hilang dan akan tetap ada di kemudian hari. Kebajikan sosial akan dihasilkan dari standar ini (Fathy, 2019).

Interaksi sosial antar kelompok dapat dilakukan dengan lebih baik jika semua pihak mengikuti standar negosiasi yang bekerja sama. Norma-norma ini dapat membantu orang memahami satu sama lain, percaya satu sama lain, dan menghormati satu sama lain. Mereka juga dapat membantu menyelesaikan konflik dan mencegah ketegangan yang berkepanjangan. Jadi, aturan negosiasi kooperatif sangat penting untuk mempertahankan hubungan sosial antara individu dan berbagai kelompok Masyarakat (Darmawan et al., 2023).

Networking (Jaringan)

Menurut Putnam, Jaringan adalah infrastruktur modal sosial yang selalu berubah yang terdiri dari jaringan-jaringan organisasi yang berinteraksi satu sama lain, yang menghasilkan pembentukan kolektivitas untuk memecahkan masalah bersama. Dengan membuat jaringan, seseorang dapat lebih mudah mengakses berbagai informasi yang mereka inginkan. Dengan jaringan, masalah dapat diselesaikan dengan mudah dan tujuan dapat dicapai dengan cepat (Khoiri, 2017). Selanjutnya, Putnam mengatakan bahwa Dalam modal sosial, jaringan mengacu pada interaksi antar organisasi yang memungkinkan penyelesaian masalah yang efektif dan efisien. Masalah akan lebih mudah diselesaikan jika bekerja sama daripada secara individu. Dalam sebuah organisasi, jaringan akan membantu orang berkomunikasi dan bekerja sama. Komunikasi akan membuka lebih banyak pintu

antara “aku” individu dan “kami” kelompok. Contoh kerja sama sebelumnya di jaringan ini akan mendorong kerja sama berikutnya.

Menurut Fukuyaman (S. Usman, 2018) mendefinisikan jaringan sebagai kelompok orang yang secara tidak resmi berinteraksi dan berbagi standar atau prinsip. Norma dan nilai ini digunakan sebagai landasan dalam melakukan interaksi sosial. Jaringan ini memainkan peran penting dalam mendorong integrasi sosial karena mereka memungkinkan individu dan kelompok, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal, bekerja sama untuk mencapai keuntungan bersama. Jaringan sosial membantu orang dari berbagai latar belakang bekerja sama dan menghubungkan mereka. Jaringan sosial dapat memainkan peran penting dalam menumbuhkan kepercayaan dan kohesi di dalam masyarakat karena mereka menjaga dan menghargai norma dan nilai bersama. Melalui jaringan sosial ini, maka individu diharapkan dapat berinteraksi, bertukar ilmu dan pengetahuan dan sumber daya, dan memberikan dukungan antara satu dengan yang lain. Interaksi sosial yang berdasarkan norma dan nilai yang umum, kemudian membentuk suatu tonggak untuk hubungan timbal balik yang dapat memberikan keuntungan secara bersama.

Menurut Suparman dalam (Rasyid et al., 2022) Jaringan adalah sumber pengetahuan yang sangat penting untuk membangun kepercayaan strategis. Media membentuk jaringan dengan membuka diri melalui media elektronik atau media sosial. Jika seseorang tidak pernah bergaul dalam kehidupan sehari-hari, sulit untuk membangun jaringan dan cenderung hidup anti sosial. Dalam modal sosial, jaringan

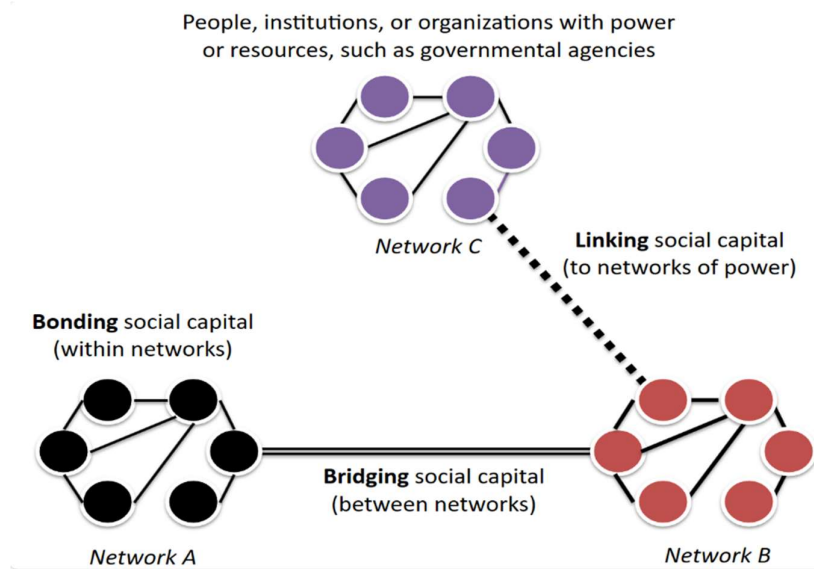
adalah semua hubungan dengan individu atau kelompok lain yang memungkinkan penyelesaian masalah dengan baik.

Menurut Badaruddin, jaringan sosial terdiri dari elemen partisipasi, pertukaran timbal balik, solidaritas, kerja sama, dan keadilan. Nopianti & Elvina menyatakan bahwa beberapa indikator variabel jaringan sosial termasuk partisipasi, pertukaran timbal balik, solidaritas, kerja sama, dan keadilan. Oleh sebab itu, Semakin kuat modal jaringan sosial juga meningkatkan kinerja kepercayaan (Suparyana et al., 2022).

Tipologi Pemberdayaan

Woolcock mengatakan bahwa modal sosial terdiri dari pembagian tipologi, keberadaan tipologi modal sosial terdiri dari 3 yaitu *bonding social capital*, *bridging social capital* and *linking social capital*. *Bonding social capital* merupakan hubungan serta interaksi antara Masyarakat namun masih dalam komunitas yang sama, biasanya dapat ditunjukkan melalui nilai, kultur, persepsi, dan tradisi atau adat istiadat (*custom*). Dapat dikatakan bahwa *bonding social capital* adalah interaksi atau hubungan yang dilakukan antara sesama Masyarakat yang ada di dalam suatu komunitas tanpa dicampuri dengan Masyarakat lain. *Bridging social capital* diartikan sebagai ikatan sosial yang timbul atas reaksi berbagai kelompok yang berbeda namun mempunyai ikatan karena adanya interaksi dalam rangka mencapai tujuan. Kelompok ini ditandai dengan institusi atau mekanisme. *Bonding social capital* hubungan atau interaksi antara Masyarakat satu dengan masyarakat yang lain yang mempunyai persamaan Nasib. Misalnya antara Masyarakat desa satu dengan Masyarakat desa lain. Sedangkan *linking social*

capital merupakan hubungan atau jaringan sosial yang di karakteristikkan dengan adanya hubungan antara beberapa level pada kekuatan sosial atau status sosial yang ada dalam Masyarakat, misalnya antara Masyarakat dengan pemerintah, antara Masyarakat dengan NGO/LSM, antara Masyarakat dengan Akademisi dan lain sebagainya (Marfai et al., 2015); (Fathy, 2019); (Dey & Djumaty, 2019). Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut dapat dilihat melalui gambar berikut:



Gambar 2.10
Bonding, Bridging dan Linking Social Capital
Sumber: Fathy, (2019)

Bonding

Menurut Hasbullah, ada 3 jenis modal sosial. Yang pertama adalah Bonding atau eksklusif, yang berarti bahwa ide, hubungan, dan perhatian anggota kelompok lebih berorientasi ke dalam (melihat ke dalam). Yang kedua adalah Bridging atau inklusif, yang berarti bahwa prinsip pengorganisasian didasarkan pada prinsip universal seperti persamaan, kebebasan, kemajemukan, kemanusiaan, terbuka,

mandiri, dan memungkinkan untuk membangun koneksi dan jaringan kerja yang menguntungkan dengan kelompok atau asosiasi, (Ekawati & Ridho Nurrochmat, 2019). Yang ketiga adalah Linking yaitu adanya relasi kerja sama antara kelompok masyarakat, organisasi dan perangkat pemerintahan dalam menjalin kesepakatan dan Kerja sama (Syahli & Sekarningrum, 2017).

Modal sosial bonding merupakan jenis dari modal sosial dalam bentuk hubungan horizontal diantar individu dalam satu kelompok modal sosial yang sama. Modal sosial bonding ini terjadi karena interaksi masyarakat setempat, di mana orang yang satu kenal dengan yang lainnya. Oleh karenanya masing-masing dari anggota memiliki akses kepada aset jejaring yang sama, sehingga menimbulkan tingkat solidaritas yang sangat tinggi. Dalam modal sosial bonding para anggota yang ada di dalamnya di persatukan oleh norma-norma (aturan), adat kebiasaan dan kepercayaan yang sama (Harsasto, 2020).

Karena adanya kepentingan bersama untuk mempertahankan eksistensi kelompok, modal sosial Bonding ini menyatukan dan mengikat anggota komunitas. Dengan memanfaatkan kekuatan ini, setiap anggota kelompok dapat mengungkapkan berbagai masalahnya dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi setiap anggota. Komunitas dengan ikatan sosial yang kuat biasanya memiliki kontrol kelompok yang kuat dan kepedulian yang tinggi, tetapi mereka juga memiliki stratifikasi sosial yang sangat rendah, sehingga simbol-simbol pelapisan tidak terlalu jelas. Mereka juga lebih bersahaja karena ciri-cirinya diversifikasi dan perbedaan sosialnya biasanya rendah (Nazaruddin et al., 2019).

Modal sosial yang berbentuk ikatan adalah modal sosial dalam konteks konsep, hubungan, dan fokus yang berorientasi ke dalam. Dalam masyarakat yang cenderung homogen, jenis modal sosial ini umumnya muncul. Menurut (Putnam), ikatan sosial kapital merupakan ciri masyarakat sakral. Masyarakat seperti itu terdominasi dan bertahan dalam sistem yang otoriter, hierarkis, dan tertutup oleh dogma tertentu. Nilai-nilai dan norma-norma yang hanya menguntungkan level hierarki tertentu selalu menggerakkan pola interaksi sosial sehari-hari masyarakat semacam itu (Pribadi et al., 2018).

Abdullah menyatakan bahwa ikatan modal sosial Bonding memiliki karakteristik dasar yang melekat, baik terhadap kelompok maupun terhadap anggota kelompok memiliki fokus ide, relasi, dan perhatian yang lebih berorientasi ke dalam (inward looking) daripada ke luar (outward looking). Jenis masyarakat atau orang-orang yang tergabung dalam kelompok ini biasanya homogen, seperti semua anggota kelompok berasal dari suku yang sama. Sebagai bagian dari kode perilaku dan kode moral suku, nilai-nilai yang diwariskan telah diakui dan diterapkan. Mereka lebih konservatif dan lebih memprioritaskan solidaritas (Dey & Djumaty, 2019).

Secara umum Hubungan kapital sosial Bonding adalah jenis kapital sosial yang digambarkan oleh hubungan dalam suatu kelompok atau komunitas yang ditunjukkan oleh tingkat kesamaan dalam sikap, karakteristik demografis, dan informasi, serta sumber daya yang tersedia (Claridge, 2018). Selain itu, kapital sosial ikatan adalah kapital sosial yang terdapat di antara masyarakat yang hidup dalam satu komunitas yang bersama-sama dan biasanya memiliki hubungan dekat

yang kuat antara satu dengan yang lainnya, seperti anggota keluarga, teman dekat, dan tetangga. Kapital sosial bonding dapat melakukan fungsi sosial yang bermanfaat dengan menyediakan sumber dukungan penting bagi mereka yang mengalami kesulitan sosial ekonomi atau kesehatan yang buruk. Orang sering lebih mampu bertahan dan memperoleh norma dan kepercayaan yang mendorong kerja sama (Anugrahini, 2019).

Bridging

Bridging social capital atau modal sosial yang menjembatani adalah suatu ikatan yang lebih luas antar beberapa individu tanpa adanya hubungan emosional. Menurut Aldrich & Meyer pengembangan bridging social capital didapat dari penggunaan bonding social capital (Norzistya & Handayani, 2020). Hubungan di luar modal sosial disebut sebagai modal sosial bridging. Struktur hirarki sosial yang ada memungkinkan setiap orang untuk memanfaatkan sumber daya jejaring yang ada. Hubungan bridging ini lebih banyak bergantung pada hubungan timbal balik yang kuat dan percaya satu sama lain. Manfaat dari bridging hubungan modal sosial sangat signifikan karena dapat memberikan akses individu kepada sumber daya di luar jejaring mereka (Harsasto, 2020).

Sosial bridging bisa berupa sistem atau institusi. Ada kemungkinan bahwa sosial bridging merupakan ikatan sosial yang muncul sebagai reaksi atas berbagai karakteristik kelompoknya yang dapat terjadi karena berbagai kelemahan yang ada di sekitar mereka, yang mendorong mereka untuk membangun kekuatan kelemahan tersebut. Adanya keterlibatan umum sebagai warga negara, asosiasi, dan jaringan adalah contoh lain dari sosial bridging. Tujuannya adalah untuk mengembangkan

potensi yang ada dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan dan memaksimalkan kekuatan yang dimiliki oleh baik Sumber Daya Alam atau Sumber Daya Manusia. (Laura et al., 2018).

Sosial Bridging (jembatan sosial) merupakan ikatan sosial yang muncul sebagai tanggapan terhadap berbagai perbedaan dalam kelompoknya. Ini dapat terjadi karena berbagai kelemahan yang ada di sekitarnya, yang memberikan kesempatan untuk membangun kekuatan baru dari kelemahan yang ada. Menurut Hasbullah, Sosial bridging didasarkan pada tiga prinsip universal:

1. Persamaan,
2. Kebebasan, dan
3. Nilai-nilai kemanusiaan dan kemajemukan (Widodo, 2016).

Dengan berinteraksi dan berinteraksi dengan kelompok di luarnya, dianggap bahwa bridging sosial capital dapat membantu perkembangan pembangunan. Coleman berpendapat bahwa tipologi masyarakat yang lebih cenderung membangun jaringan di luar gerakannya memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mendorong partisipasi dalam upaya bersama dengan kelompok yang tidak termasuk dalam gerakannya (Y. Sari, 2019).

Linking

Dalam hal perbedaan kekuasaan di antara mitra, linking modal sosial berbeda dengan bridging modal sosial. Jika pembibitan modal sosial menghasilkan kepercayaan horizontal di antara kelompok yang tidak sama, pembibitan modal sosial melibatkan hubungan klasik seperti patron-client atau mentor-menetes. Dalam pembibitan modal sosial hubungan terjadi di antara individu atau kelompok

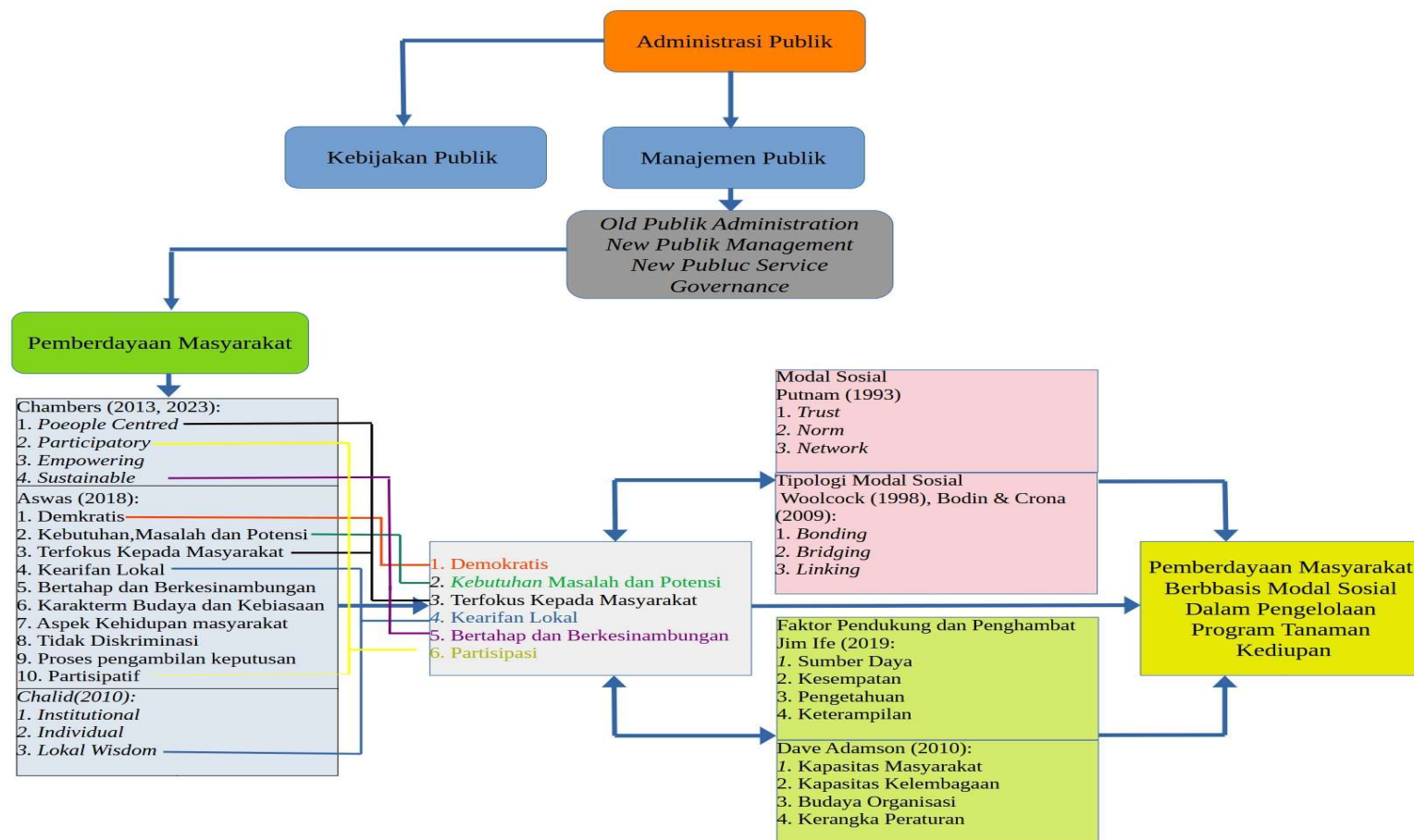
dan kelompok atau individu yang berbeda strata sosialnya dalam suatu hierarki di mana berbagai kelompok modal sosial memiliki akses ke kekuasaan, status sosial, dan kesejahteraan. Dengan demikian, daripada mengembangkan kepercayaan horizontal di antara Pola saling menguntungkan di antara pihak yang terlibat juga merupakan bagian dari hubungan terkait. Misalnya, pemberi pinjaman mengharapkan pelayanan yang efisien dan berkualitas tinggi sebagai tanggapan atas bantuan mereka (Harsasto, 2020).

Szreter & Woolcock mengatakan Salah satu manfaat yang tidak langsung dari koneksi modal sosial Linking adalah kemampuan untuk menghubungkan pejabat pemerintah dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tanggung jawab mereka. Untuk meningkatkan kesejahteraan, hubungan modal sosial sangat penting, terutama di negara-negara dan komunitas miskin, di mana bank mematok tingkat bunga yang tinggi, polisi bertindak korup, dan guru membolos. Kelompok yang terpinggirkan atau marginal memiliki banyak kesempatan karena modal sosial jenis ini (Claridge, 2018).

Sosial linking (hubungan/jaringan sosial) merupakan hubungan sosial yang memiliki hubungan di antara beberapa tingkat status dan kekuatan sosial dalam masyarakat. Pada dasarnya, ketiga jenis modal sosial ini dapat berfungsi dalam situasi tertentu; mereka dapat berfungsi baik dalam kelemahan maupun kelebihan masyarakat. Tergantung pada individu dan masyarakat, ia dapat digunakan sebagai pendukung atau penghambat dalam ikatan sosial (Laura et al., 2018). Keterlibatan pihak-pihak dalam pemberdayaan juga menunjukkan bahwa telah terbentuk modal

sosial menghubungkan (linking). Modal sosial menghubungkan (linking) terdiri dari hubungan sosial berbagai macam pihak yang memiliki perbedaan status dan peran (Subagyo & Legowo, 2021).

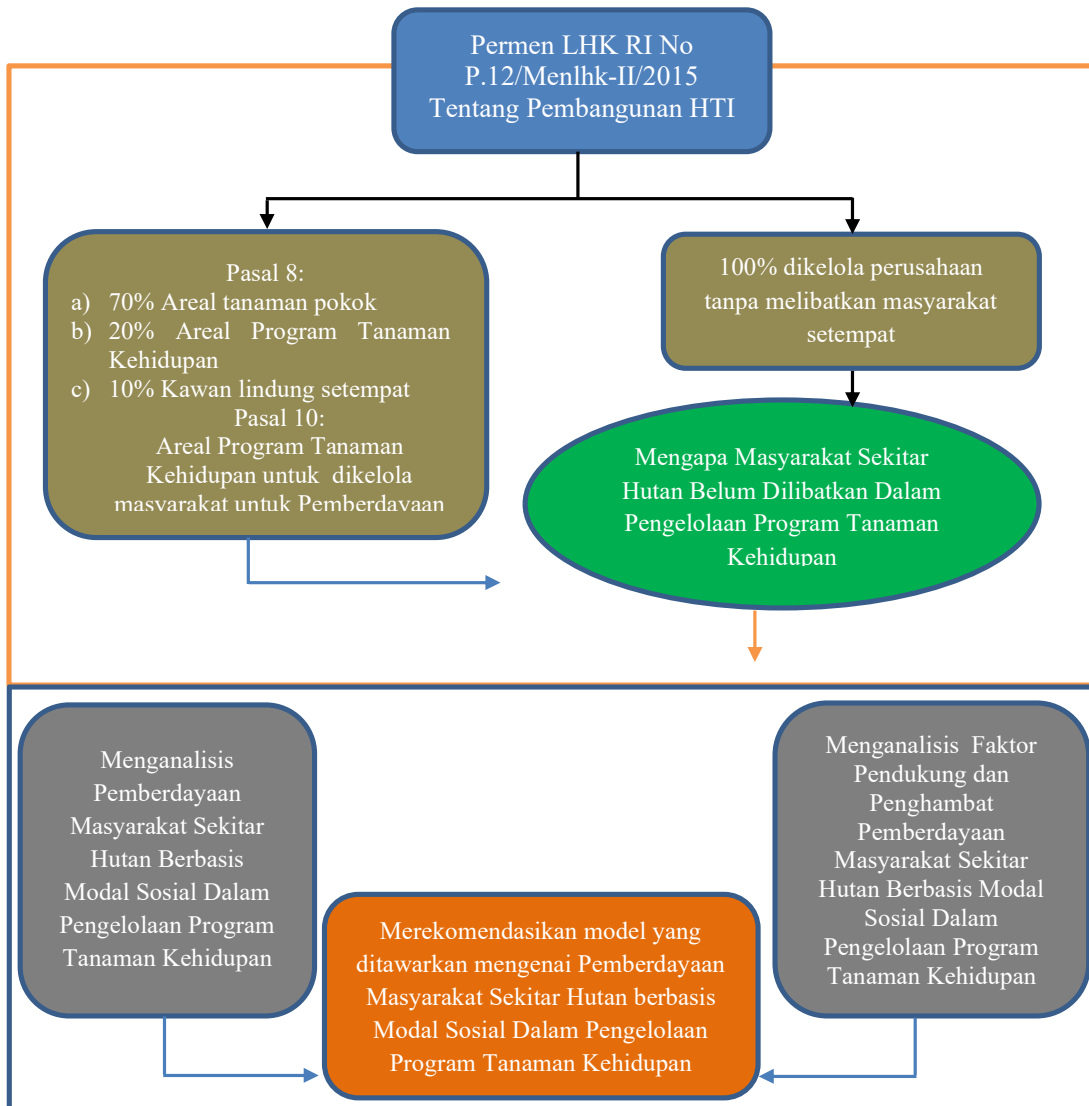
2.9 Kerangka Teori penelitian



Gambar 2.11
Kerangka Teori Penelitian

Sumber: Chambers (2012), Aswas (2018), Chalid (2010), Putnam (1993), Woolcook (1998); Bodin & Crona (2009), Jim Ife (2019), Dave Adamson (2010).

2.10 Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 2.12
Kerangka Pikir Penelitian
Sumber: Modifikasi Peneliti, 2024